

**PERAN GURU PPKN DALAM MENANAMKAN PARTISIPASI POLITIK
BAGI PEMILIH PEMULA DI SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**AHMAD MULYAWAN
NPM 2113032044**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN GURU PPKN DALAM MENANAMKAN PARTISIPASI POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA DI SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG

Oleh:

AHMAD MULYAWAN

Kesadaran politik pemilih pemula merupakan aspek penting dalam mendukung keberlangsungan demokrasi yang sehat. Namun, pada kenyataannya masih terdapat peserta didik yang belum memiliki pemahaman politik yang komprehensif, sikap kritis terhadap informasi politik, serta partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi sangat strategis dalam menanamkan kesadaran politik sejak dini melalui proses pembelajaran yang kontekstual, partisipatif, dan demokratis di lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas guru PPKn dan peserta didik di SMK 2 Mei Bandar Lampung.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn berperan aktif dalam menanamkan kesadaran politik pemilih pemula melalui pengaitan materi dengan isu-isu politik faktual, penggunaan media interaktif, diskusi kelas yang demokratis, pelaksanaan simulasi pemilu, penguatan literasi politik digital, serta pembinaan kegiatan OSIS sebagai sarana praktik demokrasi. Strategi tersebut mampu meningkatkan pemahaman politik, sikap kritis, serta partisipasi siswa dalam kegiatan demokrasi sekolah, sehingga pembelajaran PPKn berfungsi efektif sebagai wahana pendidikan politik bagi pemilih pemula.

Kata kunci: Peran Guru, PPKn, Kesadaran Politik, Pemilih Pemula, Pendidikan Politik.

ABSTRACT

THE ROLE OF PPKN TEACHERS IN INCLUDE POLITICAL PARTICIPATION FOR BEGINNER VOTERS AT SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG

By:

AHMAD MULYAWAN

Political awareness among first-time voters is a crucial aspect in sustaining a healthy democratic system. However, in reality, some students still lack comprehensive political understanding, critical attitudes toward political information, and active participation in democratic life. Therefore, the role of Civics (PPKn) teachers becomes highly strategic in fostering political awareness from an early stage through contextual, participatory, and democratic learning processes within the school environment. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. The research subjects consisted of Civics teachers and students at SMK 2 Mei Bandar Lampung. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña data analysis technique, which includes data condensation, data display, and conclusion drawing/verification. The results of the study indicate that Civics teachers play an active role in developing political awareness among first-time voters by connecting learning materials with current political issues, utilizing interactive media, conducting democratic classroom discussions, organizing election simulations, strengthening digital political literacy, and guiding student council (OSIS) activities as a practical means of democratic learning. These strategies enhance students' political understanding, critical thinking skills, and participation in school democratic activities, making Civics learning function effectively as a medium for political education among first-time voters.

Keywords: Teacher's Role, Civics Education, Political Awareness, First-Time Voters, Political Education.

**PERAN GURU PPKN DALAM MENANAMKAN PARTISIPASI POLITIK
BAGI PEMILIH PEMULA DI SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:
AHMAD MULYAWAN**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **PERAN GURU PPKN DALAM MENANAMKAN
PARTISIPASI POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA
DI SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Ahmad Mulyawan**

NPM

: **2113032044**

Program Studi

: **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan

: **Pendidikan IPS**

Fakultas

: **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I,

Dr. Yunisca Nuralisa, M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

Pembimbing II,

Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.
NIP 19840309 202521 1 055

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP 19741108 200501 1 003

Koordinator Program Studi
Pendidikan PKn

Dr. Yunisca Nuralisa, M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Yunisca Nuralisa, M.Pd.



Sekretaris : Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.



Penguji
Bukan Pembimbing : Ana Mentari, S.Pd., M.Pd.



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.
NIP. 19870504 201404 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN HASIL KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Mulyawan
NPM : 2113032044
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. Lada Ujung 1 No. 25, Gedung Meneng, Rajabasa, Bandar
Lampung, Kode Pos 35145

Dengan ini menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam karya ilmiah ini adalah hasil kerja saya sendiri yang berdasarkan pada pengetahuan dan penelitian yang telah saya lakukan. Karya ilmiah ini tidak berisi material yang telah dipublikasikan sebelumnya atau dengan kata lain bukan hasil dari plagiat karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari terdapat kecurangan dalam karya ini, maka saya siap mempertanggungjawabkannya.

Bandar Lampung, 19 Februari 2026

Bersama pernyataan



Ahmad Mulyawan
NPM. 2113032044

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ahmad Mulyawan, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 13 September 2002 yang merupakan putra kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Sukandi dan Ibu Suryati. Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis antara lain:

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009
2. Madrasah Ibtidaiyah 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015
3. Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018
4. Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2021

Pada tahun 2021 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Pendidikan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Januari tahun 2024 di desa Branti Raya Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SD 1 Branti Raya pada bulan Januari tahun 2024. Selama masa perkuliahan penulis aktif dalam kegiatan sosial dan kemahasiswaan seperti pengabdian kepada masyarakat BEM FKIP Unila tahun 2021, Relawan Bidikmisi goes to school (BMGTS) tahun 2023, Relawan pemuda Lampung DPD KNPI provinsi Lampung tahun 2024 dan Kampus Mengajar angkatan 6 di SD 3 Perumnas Way Halim. Organisasi kemahasiswaan internal dan eksternal yang pernah penulis ikuti antara lain:

1. Anggota BEM FKIP Unila tahun 2021
2. Staf Ahli BEM FKIP Unila tahun 2022
3. Ketua Komisi III DPM FKIP Unila tahun 2023
4. Ketua Biro Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga PMII Unila tahun 2025
5. Dewan Saka Adhyasta Pemilu Bandar Lampung tahun 2024
6. Anggota DPD KNPI Kota Bandar Lampung tahun 2025

MOTTO

"Tidak iri hati"

"Tidak menyesal"

"Tidak merasa rugi"

"Tidak punya ambisi"

"Tidak merasa lemah"

"Nikmati setiap hal dalam hidup"

(Ahmad Mulyawan)

"Aku melihat bahwa kepuasan itu pangkal kekayaan, lalu kupegang erat-erat ujungnya. Aku ingin menjadi orang kaya tanpa harta, dan memerintah bak seorang raja tanpa tahta."

(Irsyad Ibnu Yusefri Al-Maidany)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, karunia dan pertolongan yang tiada henti hingga saat ini, daku persembahkan karya ini sebagai tanda cinta dan baktiku kepada:

"Kedua orang tua hebatku, Bapak Sukandi (alm) dan Ibu Suryati yang sangat aku sayangi dan aku cintai. Terimakasih, terima kasih telah merawat dan menjagaku dengan penuh kasih sayang dan cinta yang tulus, yang selalu mendoakanku sukses di dunia dan juga di akhirat, yang selalu memberikan dukungan disetiap langkah hidupku, serta jerih payah pengorbanan disetiap tetes keringat demi keberhasilanku. Aku tentu tidak bisa membalas semua kebaikan yang kalian berikan namun aku selalu berusaha untuk membuat kalian tak berhenti tersenyum bangga memiliki diriku dan tak lupa pula aku selalu memohon kepada Allah SWT agar ibuku selalu diberikan kesehatan dan umur panjang untuk menemani perjalananku juga membahagiakannya dan teruntuk kebahagiaan bapak yang tak lagi disampingku semoga kasih sayang Allah SWT selalu tercurah kepadamu"

Serta

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan anugerahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Guru PPKn dalam Menanamkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula di SMK 2 MEI Bandar Lampung”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Terselesaikan skripsi ini tidak pernah terlepas dari arahan dan bimbingan, saran serta bantuan moral maupun spiritual serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan yang dialami dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd. M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraann Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dan sekaligus Pembimbing I atas masukan, saran dan bimbingan yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta segala motivasi yang telah diberikan.

7. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing II atas saran, arahan dan masukan serta telah membimbing dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Ana Mentari, S.Pd, M.Pd., selaku Pembahas I terimakasih banyak atas saran, masukan dan bimbingan yang telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., selaku Pembahas II terimakasih banyak atas segala saran, masukan yang telah diberikan sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, atas segala ilmu yang telah diberikan.
11. Untuk Alm. Bapakku Sukandi terima kasih atas segala jerih payah yang telah engkau berikan kepadaku, pelajaran-pelajaran hidup yang saat ini baru aku rasakan. Semoga kasih sayang Allah SWT selalu menyertaimu.
12. Untuk Ibuku Suryati yang sangat aku sayangi dan sangat aku cintai terima kasih atas pendidikan yang telah engkau berikan kepadaku sehingga aku menjadi pribadi yang baik, atas semua do'a yang engkau langitkan demi kebahagiaanku. Semoga Allah SWT memberikan berkah umur panjang kepadamu sehingga aku dapat mengabdikan diri untuk kebahagiaanmu.
13. Untuk saudara-saudariku Ahmad Aditya Kandi, Kiki Septiana Rizki, Iqbal Oktapianda (alm), Imam Hairudin terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan, bantuan yang tak terhitung jumlahnya. Semoga aku dapat membalas kebaikan yang telah kalian berikan.
14. Untuk teman seperjuangan selama masa perkuliahan, Afra Nadzifa Salsabila yang telah menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan.
15. Untuk teman bertumbuh selama ini, Muhammad Ghifahri Ardiansyah terima kasih telah berbagi perasaan saat senang maupun susah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk sukses bersama-sama.
16. Untuk abangku Muhammad Julianto, S.Pd. terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan, atas pelajaran berharga untuk selalu berjuang dalam

kondisi apapun. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam menyelesaikan studi magisternya.

17. Untuk teman-teman mengajar pada kegiatan Kampus Mengajar 6 di SD 3 Perumnas Way Halim (Ferdhita, Shania dan Rosmayani), atas pengalaman yang berharga dan tak terlupakan.
18. Keluarga besar Fordika 2021.
19. Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Lampung.
20. Semua pihak yang tidak bagi penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 19 Februari 2025
Penulis

Ahmad Mulyawan
NPM. 2113032044

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Guru PPKn dalam Menanamkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula di SMK 2 MEI Bandar Lampung”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT selalu memberkahi langkah kita dan memberikan kesuksesan dimasa mendatang serta semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 19 Februari 2025
Penulis

Ahmad Mulyawan
NPM. 2113032044

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
I. PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang dan Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Pertanyaan Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Ruang Lingkup Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Pendidikan PPKn	10
B. Pengertian Pendidikan Politik	14
C. Peran Guru dalam Pembelajaran	17
D. Pemilih Pemula dan Urgensinya	19
E. Teori Demokrasi Politik.....	22
F. Partisipasi Politik.....	22
G. Pemilih Pemula	34
H. Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula	22
I. Penelitian yang Relevan	22
J. Kerangka Penelitian	22
III. METODE PENELITIAN.....	44
A. Desain Penelitian.....	44
B. Fokus Penelitian	45

1. Lokasi Penelitian	46
2. Teknik Pengumpulan Data	46
3. Instrumen Penelitian.....	48
4. Prosedur Penelitian.....	49
5. Teknik Analisis Data	50
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Langkah-langkah Penelitian	52
B. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	54
C. Organisasi dan Tata Kelola	55
D. Hasil Penelitian.....	57
1. Peran Guru dalam Pembelajaran PPKn sebagai Pendidikan Politik ...	57
2. Peran Guru sebagai teladan dan Agen Demokrasi di Sekolah	59
3. Strategi Pembelajaran Guru PPKn	62
4. Kendala dan Tantangan Implementasi Pendidikan Politik.....	64
5. Dampak Pembelajaran terhadap Kesadaran Politik Pemilih Pemula..	67
6. Harapan, Implikasi, dan Rekomendasi	69
D. Pembahasan	57
1. Peran Guru dalam Pembelajaran PPKn sebagai Pendidikan Politik ...	71
2. Peran Guru sebagai teladan dan Agen Demokrasi di Sekolah	74
3. Strategi Pembelajaran Guru PPKn	78
4. Kendala dan Tantangan Implementasi Pendidikan Politik.....	81
5. Dampak Pembelajaran terhadap Kesadaran Politik Pemilih Pemula..	85
6. Harapan, Implikasi, dan Rekomendasi	88
V. KESIMPULAN	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	43
Gambar 2. Suasana pembelajaran di kelas	43
Gambar 1. Kerangka Berpikir	43
Gambar 1. Kerangka Berpikir	43
Gambar 1. Kerangka Berpikir	43
Gambar 1. Kerangka Berpikir	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Strategi pembelajaran guru PPKn Menanamkan Kesadaran Politik.....	18
Tabel 2. Kendala dan Tantangan Implementasi Pendidikan Politik	53
Tabel 3. Peran guru sebagai teladan dan agen demokrasi di sekolah	55
Tabel 4. Dampak pembelajaran terhadap kesadaran politik pemilih pemula	57

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Pendidikan merupakan sarana fundamental dalam membentuk karakter, sikap, dan pemikiran peserta didik agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Lebih dari sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, pendidikan berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menciptakan generasi yang cakap secara intelektual dan matang secara moral serta sosial. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendidikan memainkan peran penting dalam membangun kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta menanamkan nilai-nilai demokrasi yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran akan hak dan kewajiban politik tidak muncul begitu saja, melainkan perlu ditanamkan melalui proses pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Salah satu mata pelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran ini tidak hanya membahas aspek normatif dari sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai sarana pendidikan politik bagi peserta didik. Melalui PPKn, siswa diperkenalkan pada konsep-konsep dasar kewarganegaraan, partisipasi politik, hak asasi manusia, hingga pentingnya peran individu dalam menjaga keutuhan negara dan menjalankan kehidupan demokratis. Pendidikan politik dalam pembelajaran PPKn bertujuan menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, kebhinekaan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, PPKn memiliki kontribusi penting dalam membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sadar politik dan berkarakter (Hariyanti & Hambali, 2021).

Dalam konteks ini, pemilih pemula menjadi kelompok strategis yang patut mendapat perhatian serius. Mereka adalah remaja yang baru pertama kali

memperoleh hak pilih dalam pemilu, umumnya berusia 17 tahun ke atas dan masih berada di bangku sekolah menengah. Sebagai bagian dari generasi muda, pemilih pemula membawa energi, semangat idealisme, serta potensi besar untuk memperkuat sistem demokrasi. Namun, pada saat yang sama, mereka juga menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi politik, minimnya pemahaman terhadap proses demokrasi, serta rentannya mereka terhadap hoaks politik, politik uang, dan polarisasi sosial akibat informasi yang tidak valid. Kurangnya kesadaran politik pada kelompok ini dapat berdampak negatif pada kualitas demokrasi, karena mereka rentan dipolitisasi dan kurang memiliki landasan berpikir kritis dalam menentukan pilihan politiknya.

Realitas ini mengindikasikan perlunya intervensi pendidikan yang terarah, khususnya melalui pembelajaran PPKn di sekolah. Sekolah sebagai institusi formal memiliki tanggung jawab penting dalam membekali pemilih pemula dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan politik yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, guru PPKn memegang peran sentral. Mereka tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan teladan dalam pembentukan kesadaran politik siswa. Guru berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pemahaman politik yang kritis, serta mengaitkan materi pembelajaran dengan isu-isu politik aktual yang relevan dengan kehidupan siswa. Kualitas interaksi antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran akan sangat menentukan sejauh mana siswa dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi.

Implementasi pendidikan politik melalui PPKn tidak selalu berjalan optimal. Di berbagai sekolah, termasuk di SMK 2 Mei, masih ditemukan sejumlah kendala seperti keterbatasan metode pembelajaran yang kontekstual, kurangnya penggunaan media yang relevan dengan dunia remaja, hingga kesulitan dalam menumbuhkan minat dan keterlibatan aktif peserta didik dalam diskusi politik. Di samping itu, kurikulum yang padat dan sistem penilaian yang masih dominan berorientasi pada aspek kognitif menjadi tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan pembelajaran yang membentuk

kesadaran politik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan politik telah tercantum dalam kurikulum, pelaksanaannya masih sangat bergantung pada kreativitas, inisiatif, dan komitmen guru dalam mengelola pembelajaran.

Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan partisipatif. Salah satu materi penting yang diajarkan dalam PPKn adalah mengenai pemilu dan peran pemilih pemula, yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan demokrasi di Indonesia. Melalui materi ini, peserta didik dikenalkan dengan sistem politik nasional serta pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pemilihan umum. Pemahaman tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kritis dan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat demokratis. Dengan demikian, pembelajaran PPKn menjadi sarana penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini (Sholikin, 2021).

Materi pemilu terangkum dalam Kompetensi Dasar (KD) yang mendorong peserta didik memahami dan menerapkan sistem pemerintahan serta proses pemilu dalam Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka. Salah satu KD pada jenjang SMK Kelas X adalah KD 3.4 yang berbunyi "Menganalisis pentingnya pemilu dalam kehidupan demokrasi", dan KD 4.4 yaitu "Menyajikan hasil analisis mengenai proses dan pentingnya pemilu sebagai sarana demokrasi". Kompetensi dasar ini tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Terutama bagi pemilih pemula, pembelajaran ini mendorong pemahaman yang lebih dalam terhadap hak dan kewajiban politik. Oleh karena itu, kajian tentang pemilu menjadi bagian penting dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Aprilia dan Azmi, 2021). Maka dari itu, peran guru dalam menjembatani materi pembelajaran dengan kesadaran politik peserta didik menjadi inti permasalahan yang perlu diteliti secara mendalam.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di SMK 2 Mei, telah ditemukan adanya indikasi peran guru dalam meningkatkan kesadaran politik

peserta didik melalui berbagai aktivitas nyata yang melibatkan mereka secara langsung. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain adalah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, pemilihan pengurus OSIS, serta partisipasi dalam organisasi suporter sekolah “2 Mei Mania.” Aktivitas ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran PPKn tidak hanya berlangsung di dalam kelas secara teoritis, tetapi juga diimplementasikan melalui pengalaman demokrasi yang bersifat praktis di lingkungan sekolah. Meskipun demikian, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai sejauh mana kesadaran politik peserta didik benar-benar terbentuk dari kegiatan-kegiatan tersebut, baik dalam aspek pemahaman konseptual maupun keterlibatan aktif mereka sebagai subjek politik.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran guru dalam mengelola pembelajaran PPKn sebagai sarana pendidikan politik, terutama bagi pemilih pemula. Penelitian ini berupaya untuk menggali secara sistematis strategi, pendekatan, serta praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru PPKn di SMK 2 Mei dalam membina kesadaran politik siswa. Penelitian ini juga penting untuk memahami bagaimana guru mengaitkan materi pembelajaran dengan dinamika politik yang sedang berlangsung, serta sejauh mana upaya guru mampu mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, berpartisipasi aktif, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pembelajaran PPKn yang lebih efektif dan kontekstual dalam membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan partisipatif dalam kehidupan demokrasi (Iskandar & Marlina, 2019; Kurniadi, 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan pentingnya peran guru dalam meningkatkan kesadaran politik peserta didik. Penelitian oleh Pertiwi dan Saputra (2020) menunjukkan bahwa guru PPKn memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk sikap politik siswa melalui pendekatan kontekstual dan dialogis. Guru yang mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan isu-isu politik aktual cenderung lebih berhasil dalam menumbuhkan minat dan kesadaran siswa terhadap pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Temuan serupa juga disampaikan oleh Sulistyani (2021), yang menekankan

bahwa keberhasilan pendidikan politik sangat ditentukan oleh metode pembelajaran yang digunakan guru, termasuk penggunaan studi kasus, simulasi pemilu, dan diskusi kelompok. Guru yang aktif membangun ruang diskusi terbuka dan mendorong partisipasi siswa terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik di kalangan pemilih pemula.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Fitriani (2022) di salah satu SMK negeri di Jawa Barat mengungkapkan bahwa meskipun kurikulum PPKn telah memuat materi tentang demokrasi dan pemilu, pemahaman siswa tentang politik tetap rendah apabila tidak didukung dengan kreativitas guru dalam menyampaikan materi. Mereka menemukan bahwa guru yang hanya mengandalkan metode ceramah dan buku teks cenderung tidak mampu menjangkau dimensi afektif dan psikomotorik siswa. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran yang lebih aktif dan relevan dengan dunia siswa. Penelitian-penelitian tersebut memperkuat dasar bahwa peran guru PPKn dalam menanamkan kesadaran politik tidak dapat diabaikan, terlebih pada pemilih pemula yang sedang berada dalam fase pembentukan identitas kewarganegaraan. Namun demikian, penelitian spesifik mengenai praktik tersebut di SMK 2 Mei masih belum banyak dilakukan, sehingga penting untuk mengisi kekosongan ini melalui kajian lapangan yang lebih mendalam.

Di tengah era digital dan derasnya arus informasi saat ini, pemilih pemula dihadapkan pada berbagai tantangan baru dalam memahami dinamika politik. Akses terhadap media sosial dan internet memang memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi politik, namun di sisi lain juga membuka ruang besar terhadap penyebaran diinformasi dan propaganda. Kondisi ini membuat pemilih pemula sangat rentan terhadap manipulasi opini publik, terutama jika tidak dibekali dengan kemampuan berpikir kritis dan literasi politik yang memadai. Di sinilah urgensi pendidikan politik melalui peran guru menjadi semakin penting. Guru tidak hanya berperan menyampaikan teori dan materi, tetapi juga harus mampu mengembangkan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap kritis, empati sosial, serta kemampuan memilah informasi secara bijak. Hal ini menjadi dasar penting mengapa peran guru

tidak dapat dipandang sebatas pendidik, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial-politik di lingkungan sekolah.

Penelitian ini difokuskan pada SMK 2 Mei sebagai lokasi studi karena sekolah ini memiliki karakteristik yang mencerminkan keberagaman latar belakang sosial peserta didiknya, serta menjadi representasi sekolah menengah kejuruan yang memiliki potensi besar dalam mencetak generasi produktif sekaligus sadar politik. Dengan kata lain, SMK bukan hanya tempat pembinaan keterampilan kerja, tetapi juga wahana pembentukan karakter kewarganegaraan. Oleh sebab itu, memahami bagaimana guru PPKn di SMK 2 Mei menjalankan perannya dalam menanamkan kesadaran politik menjadi aspek penting untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai praktik pendidikan politik di tingkat sekolah menengah, serta menghasilkan rekomendasi yang aplikatif bagi peningkatan mutu pembelajaran PPKn secara umum. Penekanan pada strategi, media, dan pendekatan guru dalam menyampaikan materi politik kepada pemilih pemula menjadi fokus utama dari penelitian ini, sehingga hasil kajiannya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan demokrasi di lingkungan pendidikan formal.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah pada peran guru dalam menanamkan kesadaran politik bagi pemilih pemula di SMK 2 Mei Bandar Lampung. Penelitian ini menitikberatkan pada:

1. Bagaimana peran guru PPKn dalam mengaitkan materi pembelajaran dengan isu-isu politik faktual untuk menanamkan kesadaran politik siswa sebagai pemilih pemula di SMK 2 Mei Bandar Lampung?
2. Bagaimana penggunaan media interaktif dalam pembelajaran PPKn dapat mendukung penanaman kesadaran politik siswa di SMK 2 Mei Bandar Lampung?
3. Bagaimana keterlibatan aktif siswa dalam menyampaikan pendapat mencerminkan berkembangnya kesadaran politik di SMK 2 Mei Bandar Lampung?

4. Bagaimana pelaksanaan simulasi pemilu sekolah berperan dalam memberikan pengalaman demokrasi kepada siswa sebagai pemilih pemula?
5. Bagaimana penerapan literasi politik digital dalam pembelajaran PPKn membentuk sikap kritis siswa terhadap informasi politik di era digital?
6. Bagaimana peran OSIS dan kegiatan demokrasi sekolah dalam mendukung pembentukan kesadaran politik siswa di SMK 2 Mei Bandar Lampung?

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana peran guru dalam menanamkan kesadaran politik bagi pemilih pemula di SMK 2 Mei Bandar Lampung?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru dalam menyelenggarakan pembelajaran PPKn sebagai sarana pendidikan politik bagi pemilih pemula yang dapat dilihat dari strategi, metode, dan pendekatan yang digunakan guru dalam membina kesadaran politik siswa untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam menerapkan pendidikan politik melalui PPKn di lingkungan sekolah.

E. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana yang akan dicapai dalam penelitian ini, peneliti sangat berharap penelitian ini dapat berguna. Kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan secara teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

- a) Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pendidikan politik dan pembelajaran PPKn di lingkungan sekolah menengah.

- b) Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan peran guru dan pendidikan kewarganegaraan dalam membina generasi muda sadar politik.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Guru

Memberikan masukan dan wawasan baru untuk meningkatkan strategi pembelajaran PPKn yang kontekstual, kreatif, dan bermuatan nilai-nilai demokrasi.

b) Bagi Siswa (Pemilih Pemula)

Membantu meningkatkan pemahaman mereka terhadap sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokrasi.

c) Bagi Sekolah

Sebagai bahan evaluasi dalam pengembangan kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif dan kesadaran politik siswa.

d) Bagi Lembaga Pendidikan

Dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan pembelajaran PPKn yang mampu menjawab tantangan pendidikan politik di era informasi dan demokratisasi.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini berada dalam lingkup ilmu pendidikan kewarganegaraan, khususnya pendidikan politik dan pembentukan karakter demokratis melalui pembelajaran PPKn.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran PPKn sebagai sarana pendidikan politik yang diterapkan oleh guru kepada peserta didik kategori pemilih pemula.

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi guru PPKn, peserta didik kelas XI dan XII, serta kepala sekolah SMK 2 Mei Bandar Lampung.

4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di SMK 2 Mei Bandar Lampung, yang secara aktif mengimplementasikan pendidikan PPKn pada jenjang pendidikan menengah.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah diterbitkannya surat izin penelitian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dan persetujuan dari pihak sekolah, berlangsung pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pendidikan PPKn

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang berfungsi sebagai wahana strategis dalam pembentukan karakter dan kepribadian warga negara Indonesia. Sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum nasional PPKn dirancang tidak hanya untuk menyampaikan pengetahuan teoretis mengenai sistem kenegaraan, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai dasar kebangsaan seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pendidikan PPKn berlandaskan pada prinsip bahwa pendidikan adalah proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik agar memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oleh karena itu, PPKn bukan sekadar instrumen transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sarana internalisasi nilai-nilai luhur yang membentuk identitas nasional dan kesadaran konstitusional. Mata pelajaran ini mengembangkan seluruh ranah pendidikan antara lain :

1. Kognitif (pengetahuan)
2. Afektif (sikap dan nilai)
3. Psikomotorik (tindakan dan perilaku nyata)

Semuanya diarahkan untuk membentuk warga negara yang demokratis, aktif, partisipatif, serta bertanggung jawab (Nagala, 2020). Lebih jauh, PPKn memiliki kedudukan strategis dalam memperkuat jati diri bangsa di tengah arus globalisasi dan tantangan ideologis kontemporer. Dalam konteks ini, PPKn menjadi alat transformasi sosial yang menumbuhkan rasa cinta tanah air, kesadaran hukum, toleransi, semangat gotong royong, dan komitmen

terhadap keutuhan bangsa. Tujuan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan bahwa pendidikan nasional harus mampu membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Dalam pelaksanaannya, pendidikan PPKn dituntut untuk bersifat dinamis dan kontekstual. Artinya, materi dan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan zaman serta relevan dengan pengalaman nyata siswa. Proses belajar mengajar tidak boleh terbatas pada penguasaan materi secara hafalan, tetapi harus memberikan ruang partisipatif bagi siswa untuk berdialog, berdiskusi, dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Dengan pendekatan demikian, siswa akan memiliki keterampilan berpikir kritis dan reflektif terhadap isu-isu sosial, politik, dan hukum yang terjadi di masyarakat (Rafni dan Suryanef, 2019).

PPKn juga memegang peran penting dalam membentuk literasi politik siswa sejak dini. Di tengah meningkatnya kesadaran politik generasi muda, PPKn harus menjadi medium yang memberikan edukasi politik yang sehat dan bertanggung jawab. Melalui PPKn, siswa diajak untuk mengenal hak politiknya, memahami proses demokrasi, serta mengembangkan kemampuan berargumentasi dan menyampaikan aspirasi secara santun. Dengan demikian, PPKn bukan hanya pelajaran teori kenegaraan semata, melainkan juga menjadi wahana pendidikan politik yang mendewasakan partisipasi siswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Rika, 2009). Agar pendidikan PPKn tetap relevan, guru harus memiliki kemampuan pedagogis dan wawasan kebangsaan yang memadai serta peka terhadap dinamika sosial. Pembelajaran yang kontekstual dan berbasis isu aktual akan memberikan pengalaman bermakna bagi siswa, sekaligus memperkuat kesadaran kritis mereka terhadap berbagai problematika bangsa. Dalam jangka panjang, PPKn diharapkan mampu mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul secara moral dan sosial, serta memiliki integritas dalam menjalankan peran sebagai warga negara Indonesia yang sejati.

Di tengah era globalisasi yang cepat dan masif, peran pendidikan PPKn semakin krusial dalam membentuk daya tahan ideologis peserta didik. Globalisasi tidak hanya membawa kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi juga membawa nilai-nilai luar yang sering kali bertentangan dengan semangat kebangsaan dan budaya lokal. Oleh karena itu, PPKn harus difungsikan sebagai benteng pertahanan ideologis yang mampu memperkuat identitas nasional. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila, siswa didorong untuk tidak hanya menjadi warga negara yang cerdas, tetapi juga yang memiliki komitmen terhadap persatuan dan keutuhan bangsa. PPKn harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengkritisi dan menyaring nilai-nilai global secara selektif, tanpa harus kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Proses pendidikan yang demikian akan menciptakan generasi yang terbuka terhadap perubahan, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa. Dengan demikian, PPKn berfungsi sebagai pelindung budaya dan ideologi bangsa di tengah arus global yang kompetitif.

Selain sebagai instrumen pendidikan nilai dan hukum, PPKn juga memiliki peran strategis dalam membentuk kepemimpinan warga negara sejak usia sekolah. Melalui pembelajaran yang menekankan pada tanggung jawab sosial dan partisipasi publik, siswa dilatih untuk menjadi pemimpin yang adil, visioner, dan inklusif. Simulasi musyawarah, pemilihan ketua kelas, atau keterlibatan dalam organisasi siswa merupakan contoh konkret bagaimana PPKn menanamkan nilai-nilai kepemimpinan demokratis. Siswa juga diajak untuk memahami pentingnya etika dalam kepemimpinan, serta bagaimana membuat keputusan yang mempertimbangkan kepentingan bersama. Dengan pengalaman tersebut, peserta didik akan memiliki gambaran nyata tentang proses politik yang sehat dan beretika. Kepemimpinan yang terbentuk dalam konteks pendidikan PPKn bukan hanya bersifat formal, tetapi juga mengajarkan keteladanan moral dan sosial. Maka dari itu, PPKn menjadi basis awal pembentukan generasi pemimpin masa depan yang berkarakter dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Penting pula untuk ditekankan bahwa pendidikan PPKn berkontribusi besar dalam membentuk solidaritas sosial dan kohesi antarwarga. Di tengah masyarakat yang majemuk dan rentan terhadap konflik identitas, pendidikan PPKn mengajarkan nilai inklusivitas dan kebersamaan sebagai fondasi berbangsa. Materi tentang keberagaman budaya, bahasa, dan agama perlu diajarkan dengan pendekatan humanistik agar siswa memiliki empati terhadap perbedaan. Dalam konteks ini, pembelajaran PPKn juga harus menciptakan lingkungan kelas yang pluralis dan menghargai perbedaan pendapat. Guru harus berperan sebagai mediator yang adil dalam diskusi-diskusi yang melibatkan isu-isu keberagaman, agar siswa terbiasa hidup dalam masyarakat yang demokratis dan multikultural. Pendidikan yang menanamkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan dalam damai akan memperkuat ketahanan sosial bangsa. Oleh karena itu, PPKn sangat relevan sebagai sarana membangun masyarakat Indonesia yang harmonis dan berkeadaban.

PPKn memiliki peran besar dalam penguatan nilai-nilai antikorupsi yang menjadi tantangan serius dalam pembangunan nasional. Pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian integral dalam kurikulum PPKn untuk menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini. Siswa perlu diperkenalkan pada dampak negatif korupsi terhadap kehidupan masyarakat dan negara secara nyata. Metode pembelajaran seperti studi kasus dan drama pendidikan bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran kritis siswa terhadap praktik koruptif. Selain itu, guru harus menjadi figur panutan yang menunjukkan sikap jujur dan adil dalam keseharian mengajar. Dengan pendekatan yang tepat, nilai-nilai antikorupsi akan melekat dalam perilaku siswa dan terbawa hingga dewasa. Maka dari itu, PPKn tidak hanya mendidik siswa menjadi warga negara yang aktif, tetapi juga yang bersih dan berintegritas dalam menjalankan peran sosialnya.

B. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah proses yang terstruktur dan berkesinambungan untuk menanamkan kesadaran, pengetahuan, nilai, dan keterampilan kepada individu agar mampu memahami, menilai, serta berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Pendidikan ini tidak sekadar membekali seseorang dengan informasi tentang sistem pemerintahan dan lembaga negara, tetapi lebih jauh bertujuan membentuk kepribadian warga negara yang kritis, sadar hak dan kewajiban, serta mampu mengembangkan budaya politik demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerangka negara demokrasi seperti Indonesia, pendidikan politik menjadi instrumen penting untuk memperkuat kedaulatan rakyat. Melalui pendidikan politik, individu didorong untuk tidak bersikap pasif atau apatis terhadap isu-isu kebangsaan, melainkan terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan publik, baik dalam skala lokal maupun nasional. Pendidikan politik juga menjadi media untuk melatih keterampilan berpikir kritis, kemampuan berdialog, dan kepekaan terhadap keadilan sosial. Dengan demikian, pendidikan politik tidak bersifat doktriner, melainkan mendorong tumbuhnya pemikiran yang terbuka, toleran, dan reflektif.

Setiajid (2011) menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan suatu upaya sadar untuk menanamkan nilai-nilai politik ke dalam diri warga negara, sehingga mereka memiliki kompetensi dalam berpikir, bersikap, dan bertindak secara politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, pendidikan politik bukan hanya menjadi alat untuk memahami sistem politik yang ada, tetapi juga sebagai benteng terhadap degradasi etika politik seperti politik transaksional, kampanye negatif, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat melemahkan kualitas demokrasi. Di tingkat pendidikan formal, pendidikan politik dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum, khususnya melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta melalui kegiatan ekstrakurikuler. Materi-materi seperti pemilu, hak politik warga negara, partisipasi publik, peran lembaga negara, dan kebebasan berpendapat menjadi ruang awal bagi siswa untuk memahami fungsi politik dalam kehidupan bernegara. Tidak kalah penting, pendidikan politik di sekolah

harus dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata peserta didik agar lebih bermakna. Misalnya, melalui simulasi pemilu, forum debat, atau diskusi isu-isu kebijakan publik yang aktual.

Pendidikan politik juga dapat membantu membentuk karakter warga negara yang aktif dan bertanggung jawab secara sosial dan moral. Hal ini penting dalam rangka membangun demokrasi yang substansial, bukan hanya prosedural. Demokrasi yang sehat tidak cukup hanya dengan partisipasi dalam pemilu, tetapi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan publik, mengkritisi pemerintah secara konstruktif, dan menjaga ruang-ruang dialog tetap terbuka bagi semua kalangan. Oleh karena itu, pendidikan politik yang baik harus diselenggarakan dengan pendekatan partisipatif, inklusif, dan dialogis. Guru sebagai fasilitator memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang belajar yang demokratis, di mana siswa dapat mengekspresikan pendapatnya secara bebas, tanpa tekanan, serta dilatih untuk menghargai keberagaman pandangan. Lingkungan pendidikan seperti ini akan menjadi fondasi kuat bagi tumbuhnya budaya politik yang dewasa dan berkeadaban. Dengan kata lain, pendidikan politik bukan hanya kebutuhan dalam pembelajaran, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk masa depan demokrasi Indonesia. Generasi muda yang dibekali dengan pendidikan politik sejak dini akan menjadi pelaku demokrasi yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga menyoroti dimensi afektif dan psikomotorik peserta didik. Hal ini berarti, selain memahami konsep dan sistem politik, siswa juga diharapkan memiliki sikap dan keterampilan yang mencerminkan keterlibatan politik yang sehat. Dalam praktiknya, pendidikan politik harus membangun kesadaran diri siswa sebagai subjek dalam kehidupan politik, bukan sekadar objek yang menerima keputusan politik dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan pandangan (Rush dan Althoff, 2000) yang menyatakan bahwa pendidikan politik idealnya menciptakan partisipan politik, bukan sekadar penonton demokrasi. Oleh karena itu, kurikulum yang memuat pendidikan politik harus mengarahkan

peserta didik untuk berani menyampaikan pendapat, aktif dalam kegiatan musyawarah, serta mampu mengambil keputusan yang mempertimbangkan kepentingan umum. Implementasi pendidikan politik yang menyeluruh akan menjadikan sekolah sebagai ruang praktik demokrasi yang nyata bagi siswa.

Dalam konteks global saat ini, di mana informasi politik tersebar luas melalui media sosial dan internet, pendidikan politik juga harus membekali siswa dengan literasi digital yang kuat. Banyak pemilih pemula menjadi korban misinformasi dan disinformasi karena minimnya kemampuan menyaring informasi politik yang valid. Penelitian oleh Widodo (2021) menunjukkan bahwa pemilih muda yang tidak dibekali pendidikan politik cenderung terpengaruh oleh isu-isu sensasional dan propaganda politik yang tidak berdasar. Oleh sebab itu, pendidikan politik harus melampaui batas-batas kelas formal dan mencakup pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam menilai konten politik digital. Guru diharapkan dapat menyisipkan pembelajaran mengenai etika bermedia sosial, cara memverifikasi berita politik, dan memahami mekanisme penyebaran opini publik secara daring. Dengan keterampilan tersebut, siswa akan lebih siap menghadapi iklim politik yang kompleks dan penuh tantangan.

Pendidikan politik juga berkaitan erat dengan penguatan identitas kebangsaan dan pembentukan karakter kewarganegaraan. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, pendidikan politik memiliki peran strategis dalam membangun sikap toleran, saling menghargai perbedaan, serta menciptakan iklim politik yang inklusif dan dialogis. Jika pendidikan politik disampaikan dengan pendekatan yang menekankan keberagaman dan keadilan sosial, maka peserta didik akan belajar untuk menerima pluralitas sebagai kekayaan bangsa, bukan sumber konflik. Menurut (Nasution, 2022), pendidikan politik yang menanamkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keterlibatan semua kelompok masyarakat adalah fondasi dari demokrasi substansial. Hal ini sangat penting untuk menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara politik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berpolitik. Pendidikan politik yang demikian akan menjadi kekuatan sosial yang mampu

mengikat masyarakat dalam semangat persatuan dan tanggung jawab kolektif sebagai warga negara yang aktif.

C. Peran Guru dalam Pembelajaran

Guru merupakan aktor utama yang memiliki peran strategis dalam mengarahkan, membentuk, dan mengembangkan potensi peserta didik. Guru tidak hanya bertindak sebagai penyampai materi, melainkan sebagai pendidik yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, inovator, pembimbing, dan teladan. Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), peran guru semakin kompleks karena menyangkut proses pembentukan karakter, moral, dan kesadaran berbangsa dan bernegara pada diri peserta didik. PPKn bukan hanya pelajaran kognitif yang fokus pada hafalan materi hukum atau kenegaraan, melainkan merupakan proses pendidikan nilai yang menuntut pendekatan afektif dan psikomotorik. Dalam hal ini, guru menjadi jembatan utama dalam mentransformasikan nilai-nilai luhur bangsa seperti demokrasi, keadilan, toleransi, dan tanggung jawab melalui metode pembelajaran yang kreatif, aplikatif, dan kontekstual.

Guru dituntut tidak hanya paham substansi materi, tetapi juga mampu menghidupkan proses pembelajaran dengan memanfaatkan isu-isu aktual yang relevan dengan kehidupan siswa. Tujuannya adalah agar siswa tidak sekadar mengetahui, tetapi juga memahami, meyakini, dan mengamalkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan nyata. Nagala (2020) menekankan bahwa guru yang ideal adalah guru yang tidak sekadar mentransfer ilmu, tetapi mampu mentransformasikan nilai. Guru yang inspiratif akan menjadikan pembelajaran sebagai ruang dialektika antara peserta didik dengan realitas sosial, bukan sekadar ruang penghafalan konsep. Dalam konteks pendidikan politik di kelas PPKn, guru harus mampu bersikap netral dan objektif, sehingga siswa merasa aman untuk menyampaikan pendapatnya dan belajar menghargai perbedaan. Netralitas ini penting untuk menghindari indoktrinasi politik dan menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat di lingkungan sekolah.

Di sisi lain, guru juga berperan sebagai fasilitator yang merancang dan mengarahkan berbagai kegiatan pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, debat kelas, analisis isu politik aktual, simulasi pemilu, hingga proyek kepemimpinan sosial. Kegiatan semacam ini sangat penting untuk membangun partisipasi aktif siswa dan melatih keterampilan berpikir kritis serta kemampuan berargumen secara rasional dan etis. Lingkungan belajar yang interaktif dan terbuka akan memberikan ruang bagi siswa untuk memahami bahwa politik bukan sekadar urusan elit, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari yang menyentuh kepentingan bersama. Soeprapto (2014) menggarisbawahi bahwa keberhasilan pendidikan politik sangat tergantung pada kapasitas dan komitmen guru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Guru PPKn tidak cukup hanya menguasai materi ajar, tetapi juga harus memiliki kepedulian sosial dan wawasan politik yang luas. Dengan menjadi teladan dalam bersikap demokratis, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi etika dalam komunikasi, guru akan menjadi role model yang efektif dalam membentuk karakter peserta didik. Keteladanan ini akan jauh lebih membekas dibandingkan penyampaian materi yang bersifat normatif atau teoritis semata.

Peran guru juga sangat signifikan dalam mengarahkan pemilih pemula, yaitu siswa yang akan segera terlibat dalam pemilu dan aktivitas politik lainnya. Guru harus mampu memberikan pemahaman yang utuh tentang hak dan kewajiban politik warga negara, serta pentingnya keterlibatan dalam kehidupan demokratis. Melalui pembelajaran yang aktif dan aplikatif, siswa dapat memahami bahwa partisipasi politik tidak berhenti pada bilik suara, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam pengawasan kebijakan publik, advokasi sosial, dan diskusi kritis tentang masa depan bangsa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa guru merupakan elemen kunci dalam membentuk budaya demokrasi dan kesadaran politik sejak dini. Kualitas guru baik dalam aspek profesionalitas, integritas, maupun kemampuan pedagogic akan sangat menentukan kualitas generasi muda di masa depan. Guru yang berkomitmen dan reflektif akan mampu mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral, sosial, dan politik.

D. Pemilih Pemula dan Urgensinya

Pemilih pemula merupakan kelompok strategis dalam sistem demokrasi, yakni warga negara yang baru mendapatkan hak pilih, umumnya berada pada rentang usia 17 hingga 21 tahun. Mereka adalah bagian dari generasi muda yang sedang memasuki fase transisi dari remaja ke dewasa, sebuah tahap perkembangan yang sangat menentukan dalam pembentukan identitas politik. Keikutsertaan pemilih pemula dalam pemilihan umum menjadi cerminan partisipasi politik generasi muda dalam membangun masa depan demokrasi bangsa. Menurut Harianti dan Hambali (2021), kelompok pemilih pemula memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah politik nasional, baik karena jumlah mereka yang besar maupun karena potensi mereka dalam menjadi agen perubahan sosial. Namun demikian, potensi ini tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pilihan politik yang diambil. Kurangnya literasi politik, minimnya pengalaman, serta kuatnya pengaruh media sosial membuat pemilih pemula rentan terhadap manipulasi politik, seperti politik uang, hoaks, dan kampanye negatif. Oleh sebab itu, penting untuk menanamkan pendidikan politik secara sistematis sejak dini agar pemilih pemula mampu menjadi subjek politik yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab

Realitas menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih pemula masih bersikap apatis atau bahkan sinis terhadap dunia politik. Hal ini sering disebabkan oleh anggapan bahwa politik adalah sesuatu yang kotor, rumit, dan jauh dari kehidupan mereka. Selain itu, arus informasi yang tidak tersaring, terutama dari media sosial, turut mempengaruhi sikap dan preferensi politik generasi muda. Informasi yang bersifat provokatif, sensasional, atau tidak berdasarkan fakta sering kali dikonsumsi tanpa proses kritis. Dalam situasi ini, pemilih pemula berisiko menjadi korban disinformasi dan propaganda politik. Oleh karena itu, pendidikan politik di lembaga pendidikan, khususnya melalui mata pelajaran PPKn, sangat penting untuk memberikan pemahaman yang benar dan kontekstual tentang politik sebagai bagian dari kehidupan bersama.

Sekolah sebagai institusi formal memiliki peran strategis dalam membina kesadaran politik generasi muda. Guru PPKn, sebagai pengampu pendidikan

kewarganegaraan, harus mampu merancang pembelajaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga transformatif. Materi mengenai pemilu, hak politik, sistem pemerintahan, dan peran lembaga negara harus dikemas secara menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran harus diarahkan untuk membangun sikap partisipatif, kritis, serta etis dalam berpolitik.

Penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), studi kasus, diskusi terbuka, hingga simulasi pemilu dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada pemilih pemula.

Iskandar dan Marlina (2019) menegaskan bahwa pendidikan politik yang baik akan membantu pemilih pemula memahami tidak hanya hak pilihnya, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial dari keputusan politik yang diambil.

Dengan kata lain, pendidikan politik bukan sekadar membekali pengetahuan prosedural tentang pemilu, tetapi juga membentuk karakter politik yang mencerminkan integritas, kepedulian, dan keberpihakan pada nilai-nilai demokrasi. Pemilih pemula yang dibekali pendidikan politik yang tepat akan lebih siap menjadi pengawas kebijakan publik, pelaku advokasi sosial, dan kontributor aktif dalam memperkuat institusi demokrasi.

Urgensi membina pemilih pemula juga terletak pada kenyataan bahwa mereka merupakan generasi penerus bangsa. Masa depan politik Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas generasi muda saat ini. Jika mereka tumbuh dalam budaya politik yang transaksional, intoleran, dan pragmatis, maka kualitas demokrasi juga akan menurun. Sebaliknya, jika mereka dididik untuk menjadi pemilih yang kritis, rasional, dan bermartabat, maka mereka akan menjadi tulang punggung demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemilih pemula bukan sekadar kelompok usia dalam statistik pemilu, melainkan kelompok strategis yang harus dibina secara serius melalui pendekatan pendidikan yang integratif. Pendidikan politik yang efektif akan memastikan bahwa mereka tidak hanya hadir di tempat pemungutan suara, tetapi juga memahami makna hak pilih mereka dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, membangun pemilih pemula yang cerdas dan berintegritas adalah investasi jangka panjang bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia.

Peran keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama juga tidak dapat diabaikan dalam membentuk kesadaran politik pemilih pemula. Keluarga yang terbiasa berdiskusi tentang isu-isu kebangsaan, politik, dan nilai demokrasi akan memberikan dasar yang kuat bagi anak untuk mengembangkan pemikiran kritis. Sebaliknya, keluarga yang cenderung apatis atau bahkan sinis terhadap politik bisa menanamkan sikap serupa pada generasi muda. Oleh karena itu, sinergi antara pendidikan formal dan informal menjadi penting untuk membentuk kesadaran politik yang menyeluruh. Pemilih pemula membutuhkan ruang yang aman untuk belajar, bertanya, dan berdiskusi tanpa takut disalahkan atau dicemooh. Jika lingkungan keluarga mendukung, maka pembelajaran di sekolah akan semakin efektif dalam membentuk pemilih yang reflektif dan bertanggung jawab.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat juga menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pemilih pemula. Di satu sisi, mereka lebih melek teknologi dan mudah mengakses informasi politik dari berbagai platform digital. Namun di sisi lain, mereka juga lebih rentan terhadap informasi palsu, algoritma yang memperkuat bias, dan polarisasi politik berbasis media sosial. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi bagian penting dari pendidikan politik. Peserta didik harus diajarkan untuk memverifikasi sumber informasi, memahami bias media, serta mengenali strategi propaganda digital. Pendekatan interdisipliner antara PPKn dan literasi media akan menjadi solusi ideal untuk menjawab tantangan ini.

Perlu juga ditekankan bahwa pemilih pemula kerap kali menjadi sasaran utama dalam kampanye politik yang bersifat populistis dan manipulatif. Karena dianggap mudah terpengaruh dan belum memiliki pengalaman politik yang matang, kelompok ini menjadi target empuk bagi politisi yang hanya mengejar suara tanpa mempertimbangkan kualitas informasi yang disampaikan. Dalam hal ini, lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting untuk memberikan kontra-narasi yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi yang sehat. Melalui program-program edukatif dan pelibatan langsung dalam kegiatan sosial-politik, pemilih pemula bisa mendapatkan pengalaman riil dalam proses pengambilan keputusan bersama. Ini akan

memperkuat kapasitas mereka sebagai aktor politik yang independen dan berdaya.

Akhirnya, penting bagi semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, media, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya pemilih pemula yang cerdas. Kampanye pendidikan pemilih harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pemilu, tetapi juga sebagai bagian dari pembinaan karakter kewarganegaraan. Kegiatan seperti sekolah demokrasi, lomba debat politik, pelatihan kepemimpinan, atau keterlibatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat lokal dapat dijadikan wadah pembelajaran politik yang nyata. Dengan demikian, pemilih pemula dapat melihat secara langsung bagaimana keputusan politik berdampak pada kehidupan sehari-hari. Partisipasi aktif dan berkelanjutan inilah yang akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkeadaban di masa depan.

E. Teori Demokrasi Politik

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" yang berarti kekuasaan. Secara etimologis, demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam konteks teori politik, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang memberi ruang kepada rakyat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik. Partisipasi ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui wakil-wakil yang mereka pilih dalam pemilu. Oleh karena itu, pemilu menjadi instrumen penting dalam menjalankan sistem demokrasi yang sehat (Aprilia dan Azmi, 2021). Menurut Robert A. Dahl, demokrasi modern memiliki lima prinsip utama, yaitu partisipasi efektif, kesetaraan suara, pemahaman informasi, kendali agenda, dan inklusivitas. Giovanni Sartori menambahkan bahwa demokrasi mensyaratkan adanya kompetisi politik yang bebas dan perlindungan terhadap hak individu. Pemilu dalam hal ini menjadi sarana legal untuk menyalurkan kehendak rakyat secara damai. Teori-teori ini memberikan dasar penting bagi pendidikan politik, terutama untuk pemilih pemula. Melalui pembelajaran PPKn, peserta

didik diperkenalkan pada konsep-konsep demokrasi, pentingnya pemilu, serta peran aktif sebagai warga negara yang memiliki hak pilih (Hambali dkk, 2021).

Pendidikan politik sejak dini, terutama melalui mata pelajaran PPKn, menjadi sangat penting dalam membentuk karakter dan kesadaran demokratis peserta didik. Dengan memahami teori-teori demokrasi seperti yang dikemukakan oleh Dahl dan Sartori, siswa dapat mengerti bahwa demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga menjunjung tinggi partisipasi, keadilan, dan kebebasan. Hal ini sangat relevan bagi pemilih pemula, yang mulai memasuki fase kehidupan berpolitik dengan hak suara yang dimiliki. Pembelajaran ini tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga membangun sikap kritis dan tanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi harus terus dikuatkan agar generasi muda mampu menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas.

Selain membekali pengetahuan tentang prinsip-prinsip demokrasi, pendidikan politik juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi dalam keberagaman. Pemilih pemula perlu memahami bahwa suara mereka memiliki dampak nyata dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan negara. Melalui proses belajar yang kontekstual dan partisipatif, siswa dapat dilatih untuk berpikir kritis terhadap isu-isu politik dan sosial yang berkembang. Hal ini penting agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi atau politik identitas yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Dengan demikian, pendidikan demokrasi di sekolah menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat sipil yang aktif, rasional, dan bertanggung jawab (Sartori, 2016).

Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan proses pemilu dan partisipasi politik, tetapi juga mencakup pembentukan budaya politik yang sehat dalam masyarakat. Budaya politik yang demokratis ditandai dengan sikap saling menghargai perbedaan pendapat, kesediaan untuk berdialog, dan penerimaan terhadap hasil keputusan bersama. Hal ini menjadi penting dalam konteks Indonesia sebagai negara yang plural, di mana keberagaman suku, agama, dan pandangan politik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,

pendidikan politik melalui kurikulum sekolah harus diarahkan pada penguatan nilai-nilai demokrasi substansial, bukan hanya prosedural. Dalam hal ini, penguatan karakter seperti toleransi, empati, dan tanggung jawab sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan demokrasi. Dengan membiasakan peserta didik pada proses musyawarah dan pengambilan keputusan yang adil, sekolah dapat menjadi laboratorium demokrasi yang efektif.

Di era digital seperti saat ini, tantangan terhadap demokrasi juga semakin kompleks, terutama karena arus informasi yang cepat dan masif. Media sosial menjadi ruang publik baru di mana opini politik terbentuk dan disebarluaskan, namun sekaligus rentan terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi. Pemilih pemula yang belum memiliki pengalaman politik yang cukup sangat mungkin terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan, yang pada akhirnya dapat melemahkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, literasi digital dan literasi media harus menjadi bagian dari pendidikan politik di sekolah. Peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk memilah informasi, memverifikasi sumber, dan berpikir kritis terhadap konten yang mereka temui. Pendidikan demokrasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman akan mampu membentuk generasi pemilih yang tidak hanya aktif, tetapi juga cerdas dan bertanggung jawab.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam teori demokrasi politik adalah pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan sebagai bentuk implementasi prinsip checks and balances. Demokrasi yang sehat menuntut adanya partisipasi tidak hanya dalam pemilihan, tetapi juga dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum dan etika. Dalam konteks pendidikan, peserta didik harus diperkenalkan pada konsep akuntabilitas dan transparansi sebagai nilai inti demokrasi. Mereka perlu memahami bahwa menjadi warga negara yang baik bukan hanya menggunakan hak suara, tetapi juga terlibat dalam kehidupan publik dengan cara yang konstruktif. Misalnya, melalui kegiatan OSIS atau forum diskusi siswa yang melatih keterampilan menyampaikan aspirasi secara terbuka dan santun. Dengan pendekatan ini,

siswa dilatih menjadi warga negara yang peka terhadap persoalan sosial dan mampu menjadi agen perubahan dalam lingkungannya.

Lebih jauh lagi, teori demokrasi politik juga mencakup pemahaman mengenai hak asasi manusia (HAM) sebagai fondasi utama dalam sistem demokrasi. Hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berserikat adalah bagian dari kebebasan sipil yang dijamin dalam negara demokratis. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu menanamkan kesadaran akan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak tersebut, baik dalam skala nasional maupun global. Dalam konteks pemilihan umum, pemahaman ini penting agar mereka menyadari bahwa suara mereka merupakan bentuk ekspresi politik yang dilindungi oleh hukum. Selain itu, pemahaman mengenai HAM akan mendorong peserta didik untuk bersikap inklusif dan menjunjung tinggi keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pendidikan demokrasi bukan hanya menciptakan pemilih yang aktif, tetapi juga membentuk warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

1. Pendidikan Demokrasi dan Implementasinya dalam Konteks Pemilihan Umum

Pendidikan demokrasi bukan hanya sebatas penyampaian teori-teori politik semata, melainkan juga mencakup internalisasi nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pemilihan umum, pendidikan ini perlu menyoroti aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan partisipatif. Materi mengenai hak pilih, prosedur pemilu, dan pentingnya suara individu harus dikemas dalam pembelajaran yang aplikatif dan menarik. PPKn sebagai mata pelajaran strategis dapat memainkan peran penting dalam hal ini. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga fasilitator diskusi dan refleksi atas isu-isu politik yang aktual. Dengan pendekatan tersebut, peserta didik akan lebih mudah memahami bahwa demokrasi memerlukan keterlibatan aktif dan bukan sekadar retorika.

Pemilih umum sangat rentan terhadap pengaruh politik praktis dan informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, pembelajaran demokrasi harus

menekankan pentingnya literasi politik dan keterampilan memilah informasi. Materi pembelajaran sebaiknya dikaitkan dengan contoh-contoh nyata di lingkungan sekitar, seperti pemilihan ketua OSIS atau musyawarah kelas, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa demokrasi dimulai dari lingkup yang paling kecil. Melalui simulasi pemilu atau debat antar siswa, mereka dapat merasakan secara langsung dinamika proses demokratis. Pengalaman belajar seperti ini akan memperkuat pemahaman sekaligus membentuk sikap bertanggung jawab terhadap pilihan politik mereka di masa depan. Pendidikan yang kontekstual seperti ini terbukti lebih efektif dalam membangun karakter demokratis dibandingkan pembelajaran teoritis semata.

Selain melalui kurikulum formal, pendidikan demokrasi juga dapat diperkuat melalui kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kesiswaan. Kegiatan seperti latihan dasar kepemimpinan siswa (LDKS), organisasi intra sekolah (OSIS), dan forum pelajar menjadi wadah yang tepat untuk mengasah kemampuan demokratis peserta didik. Melalui forum-forum ini, siswa belajar bernegosiasi, menghargai perbedaan pendapat, serta menjalankan kepemimpinan secara bertanggung jawab. Nilai-nilai seperti keterbukaan, keadilan, dan musyawarah dapat ditanamkan secara nyata melalui pengalaman berorganisasi.

Implementasi pendidikan demokrasi tidak boleh berhenti di ruang kelas, tetapi harus diperluas ke dalam kehidupan sosial siswa. Hal ini akan menciptakan lingkungan belajar yang demokratis dan mendukung tumbuhnya generasi yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Dalam jangka panjang, pendidikan demokrasi yang baik akan menghasilkan warga negara yang aktif dan berintegritas dalam kehidupan berpolitik. Pemilih pemula yang dibekali dengan pendidikan demokrasi sejak dini akan lebih peka terhadap isu-isu keadilan sosial, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Mereka tidak hanya akan menggunakan hak pilihnya secara bijak, tetapi juga berani menyuarakan pendapatnya demi kepentingan umum. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga menjadi budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tanggung jawab besar dalam

menanamkan budaya demokratis tersebut. Oleh karena itu, sinergi antara kurikulum, guru, siswa, dan lingkungan sekolah sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung tumbuhnya demokrasi yang substansial.

2. Tantangan dan Strategi Pendidikan Demokrasi bagi Pemilih Pemula

Meskipun pendidikan demokrasi memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran politik pemilih pemula, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya minat peserta didik terhadap isu-isu politik dan pemerintahan. Politik kerap dianggap sebagai sesuatu yang kaku, membosankan, atau bahkan kotor, sehingga siswa cenderung apatis terhadap pembelajaran yang berkaitan dengan demokrasi. Hal ini diperparah dengan pendekatan pengajaran yang masih dominan menggunakan metode ceramah dan hafalan, tanpa melibatkan siswa secara aktif dalam proses berpikir kritis. Akibatnya, pembelajaran menjadi kurang relevan dengan realitas kehidupan mereka sebagai calon pemilih.

Selain itu, tantangan juga muncul dari keterbatasan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran demokrasi yang kontekstual dan partisipatif. Tidak semua guru PPKn dibekali pelatihan khusus dalam mengembangkan model pembelajaran yang mendorong diskusi, refleksi, atau simulasi politik. Padahal, pendidikan demokrasi menuntut pendekatan yang dinamis, adaptif, dan mampu merespons isu-isu politik terkini yang relevan dengan kehidupan siswa. Kurikulum yang padat dan tuntutan administratif juga menjadi hambatan tersendiri dalam pengembangan inovasi pembelajaran demokrasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru menjadi kebutuhan mendesak agar pendidikan politik bagi pemilih pemula tidak berhenti di tataran konsep.

Strategi untuk mengatasi tantangan ini perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pertama, penguatan metode pembelajaran berbasis pengalaman, seperti simulasi pemilu, debat, atau studi kasus aktual yang melibatkan siswa secara langsung dalam pengambilan keputusan. Kedua, integrasi media digital

dan teknologi informasi dalam pembelajaran, agar siswa lebih tertarik dan mudah memahami isu-isu demokrasi dalam konteks digitalisasi informasi. Ketiga, kolaborasi antara sekolah dan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU atau Bawaslu dapat menjadi langkah konkret untuk mendekatkan siswa dengan praktik demokrasi yang sebenarnya. Program sosialisasi pemilu pemula di sekolah bisa menjadi salah satu media pendidikan demokrasi yang efektif dan berkelanjutan.

Terakhir, penting untuk menciptakan budaya demokratis di lingkungan sekolah secara keseluruhan. Budaya demokratis ini dapat dibangun melalui pengambilan keputusan yang melibatkan siswa, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, serta pembiasaan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Keteladanan guru dan kepala sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi juga menjadi faktor penting dalam membentuk iklim demokratis yang positif. Dengan dukungan kebijakan yang progresif dari pihak sekolah maupun pemerintah, pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula tidak hanya menjadi program formal, tetapi menjadi gerakan kolektif yang mendorong tumbuhnya generasi muda yang sadar, aktif, dan bertanggung jawab secara politik.

F. Partisipasi Politik

1. Definisi Partisipasi

Politik Menurut Miriam Budiardjo sebagai definisi umum dari partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut dan aktif dalam dunia politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin secara langsung atau tidak langsung dan memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan yang termasuk kedalam partisipasi politik menurut Miriam antara lain mencakup tindakan seperti memberikan suara pada saat pemilihan umum, menjadi anggota dalam suatu partai politik atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, melakukan hubungan atau lobbying dengan para anggota parlemen atau para pejabat pemerintah, ikut menghadiri rapat umum, dan sebagainya.

Menurut Thoha, bahwa: “Partisipasi politik adalah suatu cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain” pengambilan keputusan dalam politik adalah “seperangkat yang diambil individu atau kelompok dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan sebagai reaksi terhadap suatu masalah, masalah adalah suatu penyimpangan antara masalah dengan pemimpin. Menurut Keith Faus Partisipasi politik adalah “keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok kedalam proses pemerintahan”. Damsar dengan demikian individu disini sangatlah berperan aktif dalam kegiatan pelaksanaan pemerintahan.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi Tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya Tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi pendekatan berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Hal yang diteropong terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak,

yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.

3. Jenis-Jenis Partisipasi Politik

Menurut Milbrath dan Goel dalam Cholisin mengidentifikasi bahwa terdapat empat jenis partisipasi politik yang terjadi di lingkungan masyarakat yakni:

- a. Partisipasi Politik apatis yang merupakan bentuk partisipasi politik di mana masyarakat tidak memiliki keingintahuan atau menarik diri untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Dengan kata lain, seseorang tidak pernah sama sekali untuk ikut serta dalam mengikuti kegiatan politik termasuk pemilu.
- b. Partisipasi politik spectator, partisipasi jenis ini merupakan jenis partisipasi politik dimana seseorang atau masyarakat setidaknya pernah ikut serta mengikuti kegiatan politik dalam hidupnya. Sebagai contoh adalah masyarakat yang hanya ikut serta dalam pemilu saja. Masyarakat yang mengikuti kegiatan seperti pemilu namun tidak memberikan hak suaranya juga termasuk dalam jenis partisipasi ini.
- c. Partisipasi politik gladiator, berbeda dengan jenis-jenis partisipasi politik sebelumnya partisipasi politik ini merupakan jenis partisipasi politik dimana masyarakat aktif untuk ikut serta dalam kegiatan politik seperti komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
- d. Partisipasi politik pengkritik, partisipasi jenis ini dapat diartikan sebagai kegiatan masyarakat yang tidak konvensional dalam kegiatan politik. Beberapa contoh bentuk partisipasi politik tidak konvensional antara lain: pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan seperti pengrusakan, pengeboman dan lain-lain.

4. Ciri-Ciri Partisipasi

Politik Ciri partisipasi menurut Santoso Sastropetro adalah:

- a. Partisipasi haruslah bersifat sukarela.

- b. Ikut serta Kampanye
- c. Berbagai issue atau masalah haruslah disajikan dan dibicarakan secara jelas dan obyektif.
- d. Kesempatan untuk berpartisipasi haruslah mendapat keterangan atau informasi yang jelas dan memadai tentang setiap segi/aspek dari program yang akan didiskusikan.
- e. Partisipasi masyarakat dalam rangka menentukan kepercayaan terhadap diri sendiri haruslah menyangkut berbagai tingkatan dan berbagai sektor, bersifat dewasa, penuh arti, berkesinambungan dan aktif.

Dengan berpedoman pada pendapat Keith Davis, T. Ndarha mengemukakan ada 3 (tiga) Hal yang merupakan ciri-ciri partisipasi, yaitu:

- 1) Titik berat partisipasi adalah mental dan emosional, kehadiran secara pribadi dalam suatu kelompok, tanpa keterlibatan tersebut bukanlah suatu partisipasi.
- 2) Kesiediaan untuk memberikan kontribusi. Tujuan wujud kontribusi dalam kontribusi dalam pembangunan ada bermacam-macam, misalnya jasa, barang, uang, bahkan buah pikiran dan keterampilan.
- 3) Keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha untuk mengambil bagian dalam pertanggungjawaban.

4. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Politik Menurut Mas"oed dan MacAndrews partisipasi politik masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. Electoral activity, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan.
- b. Lobbying, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu.

- c. Organizational activity, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa.
- d. Contacting, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya.
- e. Violence, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan, dan pengrusakan.

Menurut Gabriel Almond membagi bentuk partisipasi politik menjadi dua, yakni: Pertama, partisipasi secara konvensional dimana prosedur dan waktu partisipasinya diketahui publik secara pasti oleh semua warga. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk pemberian suara (voting), diskusi politik, kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, serta komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative. Kedua, partisipasi secara non konvensional. Artinya, prosedur dan waktu partisipasi ditentukan sendiri oleh anggota masyarakat, yang melakukan partisipasi itu sendiri. Dapat dilihat dari tindakan pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), serta perang gerilya atau revolusi. 12 Adapun bentuk partisipasi politik pemilih pemula yaitu: Electoral Activity, lobbying, Organizational, Contacting, dan Violence.

5. Sifat Partisipasi Politik

Menurut Huntington dan Nelson sebagaimana dikutip Budiardjo partisipasi politik dapat bersifat Otonomi dan Mobilisasi.

- a. Partisipasi politik yang bersifat Otonom (Autonomous Participation) yaitu partisipasi politik yang didasarkan pada kesadaran politik setiap warga untuk menentukan pilihan.
- b. Partisipasi politik yang bersifat Mobilisasi (Mobilized Participation) yaitu partisipasi politik yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain.

Jadi partisipasi politik otonom dilaksanakan berdasarkan pada kesadaran politik setiap orang tanpa adanya paksaan, ancaman ataupun pengerasan. Partisipasi politik otonom murni muncul atas dorongan atau kehendak pribadi. Sedangkan partisipasi politik yang dimobilisasi merupakan partisipasi politik paksaan, ancaman bahkan tindakan kekerasan lainnya dengan maksud mengubah pilihan warga.

6. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi

Politik Pemilih Pemula Berikut merupakan faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula :

a. Faktor Pendorong Partisipasi Politik Pemilih Pemula:

- 1) Rasa ingin tahu, rasa ingin tahu yang tinggi saat menginjak usia remaja mengakibatkan ketertarikan untuk terlibat dan mengetahui sesuatu. Sama halnya dengan pemilih pemula yang ikut berpartisipasi politik mereka memiliki ketertarikan untuk mengetahui sehingga melibatkan diri untuk melakukan partisipasi politik.
- 2) Kesadaran politik pemilih pemula, pemilih pemula yang telah terdaftar dan memiliki dan menggunakan hak pilihnya memiliki kesadaran bahwa mereka juga turut menentukan nasib rakyat oleh karena itu mereka ikut berpartisipasi dalam hal ini memilih dalam pemilu 2024.

b. Faktor Penghambat Partisipasi Politik Pemilih Pemula:

- 1) Kesibukan kegiatan sehari-hari, kesibukan sebagai pelajar sangat banyak dan padat, sehingga pemilih pemula lebih memilih melakukan kegiatan sehari-hari mereka ketimbang harus ikut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan politik yang menyita waktu banyak.
- 2) Perasaan tidak mampu, perasaan minder ini biasa muncul karena merasa kurang berpengalaman dalam pemilu dan memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah sehingga tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu. Misalnya, orang yang memiliki status ekonomi tinggi

lebih berhak berpartisipasi dalam politik ketimbang orang yang memiliki status ekonomi rendah, jenis kelamin pun demikian mempengaruhi keaktifan seseorang, laki-laki lebih aktif dari perempuan. Dengan adanya gejala seperti ini mereka lebih merasa aman jika berada di sektor privat.

- 3) Larangan dari pihak keluarga, pihak keluarga sangat berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Apabila ada larangan dari keluarga seseorang biasanya mengurungkan niatnya. Dalam hal ini harusnya keluarga mengarahkan untuk melakukan partisipasi bukan melarang.

G. Pemilih Pemula

Menurut UUI No. 101 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan/atau lebih atau sudah/pe pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Pemilihan umum merupakan salah satu alat demokrasi yang mewakili kedaulatan rakyat. Ini adalah cara bagi rakyat untuk memilih wakil dan pemimpin yang memiliki visi, berkualitas, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu kelompok pemilih yang menarik untuk diselidiki lebih lanjut adalah pemilih pemula. Pemilih Pemula adalah orang yang pertama kali memberikan suara mereka dalam Pemilu.

Pemilih pemula yaitu mereka yang berusia 17-22 tahun, yang untuk pertama kalinya akan berpartisipasi dalam pemilu. Status mereka adalah pelajar, mahasiswa atau pekerja muda. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

- a. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.
- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
- c. Terdaftar sebagai pemilih.
- d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
- e. Terdaftar di DPT.

Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing voters yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamik lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orangtua hingga kerabat dan teman. Selain itu, media massa juga ikut berpengaruh terhadap pilihan pemilih pemula.

Hal ini dapat berupa berita di televisi, spanduk, brosur, poster, dan lain-lain. Pentingnya peranan pemilih pemula karena sebanyak 52% dari seluruh pemilih adalah pemilih pemula, dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah besar, sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya jangan sampai tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya, dll. Pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa. Dalam rangka mendapatkan perolehan suara yang banyak, diperlukan berbagai cara atau terobosan baru dalam peningkatan partisipasi dan aspirasi pemilihan.

H. Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula

1. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang berkepribadian politik, agar memiliki kesadaran politik dan mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan politik perlu diberikan kepada generasi muda, mengingat kondisi masyarakat yang beranekaragam, banyak diantaranya yang masih berada pada keterbelakangan dan ketidaktahuan politik serta pendidikan tersebut diperlukan untuk merangsang partisipasi aktif rakyat dalam Gerakan Pembangunan.

2. Bentuk Pendidikan Politik Pemilih Pemula

Sosialisasi politik merupakan salah satu bentuk pendidikan politik.

Diharapkan dengan adanya pendidikan politik semua komponen masyarakat yang akan menyelenggarakan pemilu atau pilkada bisa saling bekerjasama untuk menciptakan kondisi yang demokratis dan penuh dengan tanggungjawab. Komponen masyarakat yang diharapkan mampu untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan pesta demokrasi adalah para generasi muda atau para pemilih pemula. Dalam hal ini para pemilih pemula harus bisa belajar tentang pendidikan politik dengan baik, supaya para pemilih pemula mampu untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik di satu sisi merugikan tapi di satu sisi juga sangat menguntungkan.

3. Agen Sosialisasi Politik

Pemilih Pemula Agen sosialisasi politik dapat dilakukan oleh berbagai aktor, baik individu, kelompok atau organisasi. Damsar membuat identifikasi terhadap empat agen sosialisasi strategis, yakni; keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, dan media massa. Menurut Damsar, agen-agen ini paling penting perannya dalam membentuk pengetahuan, sikap, nilai, norma dan perilaku esensi manusia.

a) Keluarga

Keluarga merupakan agen sosialisasi politik yang sangat potensial untuk mempengaruhi setiap individu. Hal ini disebabkan karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap individu. Dikatakan sebagai lingkungan yang pertama karena individu semenjak lahir dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dan sebelum berkenalan dengan berbagai nilai dalam masyarakat, individu yang bersangkutan telah mengenal nilai-nilai dalam keluarga. Begitu juga keluarga merupakan lingkungan yang utama, karena individu umumnya menghabiskan sebagian besar waktunya dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian bagaimana situasi dan kondisi keluarga akan sangat mempengaruhi perkembangan individu. Begitu juga dalam kaitannya dengan kehidupan

politik. Seberapa besar nilai-nilai politik itu ada dalam kehidupan keluarga akan sangat menentukan seberapa nilai-nilai itu dalam diri individu.

b) Sekolah

Sekolah memegang peranan penting dalam proses sosialisasi politik didik, walaupun sekolah merupakan hanya salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak. Anak mengalami perubahan dalam perilaku politiknya setelah masuk sekolah dan melakukan komunikasi, interaksi terhadap lingkungan warga sekolah yang memungkinkan menambah pengalaman siswa dalam menghadapi masalah pribadinya dan lingkungannya. Sosialisasi politik melalui sekolah memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan agen sosialisasi politik lainnya. Melalui mata pelajaran kewarganegaraan siswa dapat menerima sosialisasi politik secara langsung, karena kompetensi dasar mata pelajaran tersebut memuat kompetensi dasar mayoritas pembelajaran politik.

c) Kelompok Teman Sebaya

Teman sebaya merupakan lingkungan bergaul seorang anak dan tempat berinteraksi dengan teman sebayanya. Dari teman sebaya remaja bisa menerima umpan balik mengenai kemampuan mereka. Remaja cenderung untuk mengikuti pendapat dari kelompoknya atau teman sebayanya dan selalu menganggap teman sebayanya itu selalu benar. Kecenderungan untuk bergabung dengan teman sebayanya didorong oleh keinginan anak-anak remaja untuk mandiri, dan mengambil keputusan sendiri, bahkan menolak pandangan dan nilai yang berasal dari keluarga dan mempelajari pola sikap yang bisa diterima oleh teman sebayanya. Pendapat lain mengenai cara menumbuhkan sikap rasa kepercayaan kepada teman sebaya bisa dilakukan dengan mengajak teman berpartisipasi dalam pemilihan. Dari keterangan-keterangan di atas diperoleh kejelasan bahwa remaja kepekaan sehingga akan meningkatkan rasa empati atau dapat merasakan apa yang dirasakan oleh teman sebayanya.

d) Media Massa

Media massa merupakan saluran komunikasi politik yang banyak untuk kepentingan seperti ini. Hal tersebut dikarenakan sifat media massa yang dapat mengangkat pesan-pesan (informasi dan pencitraan) secara massif dan menjangkau khalayak atau publik yang beragam, jauh, dan terpencar luas. Pesan politik melalui media massa akan sangat kuat mempengaruhi perilaku politik mahasiswa. Pentingnya perilaku politik dalam menunjang keberhasilan pembangunan politik tampak dari perhatian ilmuwan politik yang tetap besar terhadap masalah ini. Asumsi umum menunjukkan bahwa demokrasi dapat dipelihara dan dipertahankan karena terdapat partisipasi warga negara yang aktif dalam urusan kewarganegaraan. Partisipasi aktif mereka dalam kehidupan politik tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan informasi, dan saluran atau media yang paling efektif untuk penyebaran informasi adalah media massa.

e) Perilaku Pemilih Pemula

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Terdapat beberapa daerah/wilayah yang merupakan kumpulan komunitas masyarakat yang terbentuk atas dasar sistem kekerabatan dan paguyuban berdasarkan keturunan dan yang menjadi pemuka masyarakat tersebut berasal dari keluarga atau kerabat asli keturunan dari orang yang dipandang terkemuka dari segi sosial ekonomi atau terkemuka karena ketokohnya. Sehingga warga masyarakat seringkali menyandarkan diri dan sikapnya terhadap pemuka/tokoh masyarakat tersebut. Sikap ini mencerminkan adanya dominasi ketokohan yang berperan untuk menentukan sikap dan perilaku serta orientasi warga bergantung pada pemuka tersebut.

Sikap ini mencerminkan adanya dominasi ketokohan yang berperan untuk menentukan sikap dan perilaku serta orientasi warga bergantung pada pemuka tersebut. Kecenderungan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam berbagai kehidupan sosial ekonomi, sosial

politik maupun sosial budaya, terbatas pada adanya sistem ide atau gagasan dari pemuka masyarakat untuk memodifikasi sistem sosial dan sistem budaya yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat disesuaikan dengan kondisi dan dinamika masyarakat. Sikap dan pandangan untuk memilih atau tidak memilih dalam proses politik lebih besar, sehingga tingkat kesadaran dan partisipasi politiknya ditentukan oleh sikap dan pandangan individu yang bersangkutan, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh tokoh atau ikatan primordialisme tertentu.

f) Pemilih Pemula 2024 dan Masa Depan Pemilu

Masa-masa yang akan datang adalah masa dimana pemilih pemula 2024 akan tiba saatnya mereka yang akan turut serta menyelenggarakan pesta demokrasi yang lebih maju dan berkembang. Era Pemilih Pemula ke depan adalah era digitalisasi, rangkaian teknologi informasi yang cepat bukanlah hal yang baru bagi mereka. Pemilih pemula di Indonesia di bagi atas tiga kategori. Pertama, pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.

Pemilih Pemula 2024 adalah mereka yang lahir di atas tahun 1995 dan mereka inilah yang disebut Gen Z atau generasi digital. Bagil Sirajul Fuadl Zis Idkk, “Generasi Z ini lebih cepat merespon perangkat digital dibandingkan generasi milenial, tanpa belajar dan diajaripun gen Z dapat memainkannya (Jurnal satwika)”. Sehingga tidak mengherankan jika usia remaja saat ini, lebih menguasai aplikasi teknologi ataupun media sosial dibandingkan orang tuanya. Pasca pemilu serentak 2024, Negara sudah harus mengagas Pemilu berikutnya yang berbasis teknologi dan digital, meskipun sebelumnya sudah pernah diwacanakan namun rencana ini harus tetap berlanjut. Kedepannya Pemilu sudah harus berbasis e-voting. Ada banyak keuntungan dari sistem e-voting ini, walaupun pasti terdapat

juga kendala teknis. Pemilu serentak 2024 adalah langkah awal menentukan masa depan Pemilu dan membina pemilih pemul seluruh Indonesia sebagai penerus penyelenggaraan pemilu nantinya. Oleh karena itu para pemilih pemul harus diberikan tontotonan demokrasi yang edukatif, menggembirakan serta penyelenggaraan yang memiliki daya tarik.

g) Kaitan Partisipasi Politik dengan Kajian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam kajian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). IPS mempelajari berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta proses pengambilan keputusan dalam suatu negara. Pemahaman tentang partisipasi politik sangat penting bagi siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Berikut beberapa alasan mengapa partisipasi politik penting dalam kajian IPS:

1. Memahami hak dan kewajiban warga negara: IPS mengajarkan siswa tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa siswa menyadari hak-hak mereka dan mampu menggunakannya untuk membuat perubahan positif di masyarakat.
 2. Meningkatkan kesadaran *civic*: IPS membantu siswa untuk mengembangkan kesadaran *civic*, yaitu pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran *civic* yang tinggi mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan politik dan sosial, serta untuk mengambil tanggung jawab atas komunitas mereka.
 3. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis: Partisipasi politik membutuhkan keterampilan berpikir kritis, seperti kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang tepat. IPS membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan ini sehingga mereka dapat menjadi partisipan politik yang efektif.
- Kesimpulannya, partisipasi politik merupakan aspek penting dalam kajian

IPS. Pemahaman tentang partisipasi politik sangat penting bagi siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab

I. Penelitian yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1 Penelitian yang dilakukan oleh Martini, Azwar, dan Pringga (2018) yang berjudul *“Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Kesadaran Partisipasi Pemilih Pemula di SMK PGRI 1 Cimahi”* menunjukkan bahwa pendidikan politik yang diberikan melalui pembelajaran PPKn memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran partisipasi politik pemilih pemula. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan dilakukan dengan menyebarkan angket kepada siswa kelas XII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan politik memberikan kontribusi sebesar 29,1% terhadap tingkat partisipasi politik siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pendidikan politik yang diberikan, maka semakin tinggi pula kesadaran siswa dalam berpartisipasi dalam pemilu. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama mengkaji tentang pentingnya pendidikan politik dalam membentuk kesadaran politik siswa. Namun, perbedaan terletak pada pendekatannya, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada peran guru PPKn di SMK 2 Mei Bandar Lampung dalam menanamkan kesadaran politik melalui strategi pembelajaran.
- 2 Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Rahmayanti (2023) dalam penelitiannya yang berjudul *“Peran Guru dalam Menerapkan Pembelajaran PPKn sebagai Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di Kota Yogyakarta”*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana guru menjalankan peranannya dalam menanamkan nilai-nilai politik dan demokrasi kepada siswa yang tergolong pemilih pemula. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki tiga peran utama yaitu sebagai pendidik yang menanamkan pengetahuan politik, sebagai fasilitator yang menciptakan suasana diskusi dan partisipasi aktif di kelas, serta sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa untuk bersikap kritis terhadap isu-isu politik. Penelitian ini juga menyoroti hambatan-hambatan yang dihadapi guru seperti rendahnya minat siswa terhadap politik dan kurangnya media pembelajaran yang mendukung. Penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama menyoroti peran guru dalam pembelajaran PPKn bagi pemilih pemula. Akan tetapi, penelitian penulis lebih difokuskan pada konteks lokal di SMK 2 Mei Bandar Lampung dan akan mendalami strategi serta pendekatan konkret yang digunakan guru dalam mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam proses pembelajaran.

J. Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya, maka pada bagian ini disajikan kerangka pikir yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa peran guru PPKn sangat penting dalam membentuk kesadaran politik peserta didik, terutama melalui kegiatan-kegiatan demokratis di lingkungan sekolah seperti pemilihan ketua kelas, OSIS, dan kegiatan organisasi informal seperti Suporter 2 Mei Mania. Kegiatan tersebut menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi, tanggung jawab, dan keberanian menyampaikan pendapat.

Melalui keterlibatan peserta didik dalam kegiatan tersebut, diharapkan akan terbentuk indikator partisipasi seperti keberanian mencalonkan diri, kemampuan mengemukakan pendapat, serta aktif dalam memilih calon ketua. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing, memberi ruang diskusi, serta memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi sederhana tersebut. Dengan demikian, peran guru PPKn diyakini mampu meningkatkan

kesadaran politik peserta didik sebagai pemilih pemula. Adapun skema kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain evaluatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam peran guru dalam menanamkan kesadaran politik bagi pemilih pemula di SMK 2 Mei.

Pendekatan kualitatif ini dipilih karena mampu mengungkap makna di balik tindakan dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam membentuk kesadaran politik siswa, sekaligus memahami respons serta keterlibatan siswa sebagai calon pemilih pemula dalam konteks pembelajaran PPKn. Pendekatan ini dinilai relevan karena berfokus pada realitas sosial yang bersifat kompleks dan kontekstual, serta menekankan pemahaman subjektif atas pengalaman guru dan siswa dalam praktik pembelajaran.

Menurut Harahap (2020), penelitian kualitatif berkaitan erat dengan pola perilaku manusia serta faktor-faktor yang memotivasi tindakan yang sering kali tidak tampak secara eksplisit. Halaluddin dan Hengki (2019) menegaskan bahwa penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena dalam kondisi alami tanpa adanya manipulasi dari peneliti, sehingga makna yang diperoleh lebih otentik. Sejalan dengan itu, Creswell et al. (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif mengandalkan interaksi langsung dengan partisipan melalui wawancara terbuka, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan guru PPKn dan siswa sebagai pemilih pemula, observasi langsung terhadap proses pembelajaran, serta pengumpulan dokumentasi pendukung. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik tersebut selanjutnya dibandingkan dan dianalisis secara berkesinambungan guna memastikan konsistensi informasi serta meningkatkan

tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian, sebagaimana dikemukakan oleh Denzin (1978). Dengan demikian, desain penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai peran guru PPKn dalam menanamkan kesadaran politik bagi pemilih pemula di SMK 2 Mei, serta bagaimana proses pembelajaran tersebut diterima dan dimaknai oleh siswa.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peran guru dalam menanamkan kesadaran politik bagi pemilih pemula, khususnya di lingkungan SMK 2 Mei. Penelitian ini menitikberatkan pada cara guru mendesain, menyampaikan, serta mengevaluasi materi pembelajaran PPKn yang mengandung nilai-nilai politik dan demokrasi, dengan tujuan membentuk kesadaran politik serta meningkatkan partisipasi politik siswa sebagai calon pemilih pemula.

Fokus ini mencakup beberapa aspek penting:

1. Peran Guru dalam Konteks Pembelajaran PPKn:

- Bagaimana guru memahami fungsi strategis PPKn sebagai wahana pendidikan politik.
- Peran guru sebagai pendidik, fasilitator, motivator, dan teladan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi politik.
- Kemampuan guru dalam memposisikan materi ajar PPKn untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap sistem politik, lembaga negara, hak politik, dan proses pemilu.

2. Strategi dan Metode Pembelajaran yang Digunakan:

- Jenis pendekatan dan metode yang digunakan guru dalam mengintegrasikan isu-isu politik ke dalam pembelajaran, seperti diskusi, studi kasus, simulasi pemilu, role-play, dan pemanfaatan media digital.
- Kegiatan pembelajaran yang mendorong berpikir kritis, dialog terbuka, dan sikap toleransi terhadap perbedaan pandangan politik.

3. Pengaruh Pembelajaran terhadap Pemilih Pemula:

- Dampak dari pembelajaran yang diterapkan guru terhadap pemahaman, sikap, dan kesadaran politik siswa sebagai pemilih pemula.
- Persepsi siswa terhadap peran guru dan pengalaman belajar politik di kelas PPKn.
- Tingkat keterlibatan dan kesiapan siswa dalam menyongsong peran sebagai warga negara yang aktif secara politik.

4. Konteks Sosial dan Budaya Sekolah:

- Dukungan atau hambatan yang memengaruhi implementasi pendidikan politik di sekolah.
- Bagaimana nilai-nilai politik dan demokrasi dipraktikkan dalam lingkungan sekolah, baik secara formal melalui kurikulum maupun secara informal melalui budaya sekolah.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan proses pembelajaran yang terjadi, tetapi juga untuk menilai efektivitas dan relevansi praktik pembelajaran PPKn dalam membentuk karakter dan kesadaran politik siswa. Fokus ini menjadi penting mengingat posisi pemilih pemula sebagai kelompok strategis dalam keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Dengan memahami bagaimana guru menjalankan perannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pembelajaran PPKn yang lebih kontekstual dan transformatif.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMK 2 Mei yang berlokasi di Bandar Lampung. Sekolah ini dipilih karena telah menerapkan kurikulum PPKn yang relevan dengan topik pendidikan politik, serta memiliki siswa-siswa pada jenjang kelas XI dan XII yang tergolong pemilih pemula.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu guru PPKn, siswa sebagai pemilih pemula, kepala sekolah, dan dosen pengamat, guna memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai peran guru

dalam menanamkan kesadaran politik di SMK 2 Mei. Data yang diperoleh melalui berbagai teknik dan sumber tersebut dibandingkan untuk melihat kesesuaian dan konsistensi informasi, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.

Menurut Sugiyono (2017), penggunaan berbagai teknik dan sumber data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang lebih valid dan komprehensif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk melihat secara langsung praktik pembelajaran, wawancara digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman informan, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung dan penguat terhadap temuan lapangan. Berikut adalah penjabaran dari teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Peneliti akan berperan sebagai observer yang mengamati dan mencatat poin-poin penting selama proses pembelajaran berlangsung. Fokus utama observasi ini adalah untuk mengetahui peran guru dalam menanamkan kesadaran politik bagi pemilih pemula, khususnya di lingkungan SMK 2 Mei seperti guru PPKN, dan siswa/i.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung antar peneliti dan partisipan (Ardiansyah dkk., 2023). Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pewawancara, sementara yang diwawancarai adalah pihak SMK 2 Mei, Kepala Sekolah SMK 2 Mei, guru PPKN, siswa/i dan Dosen Pengamat. Wawancara yang dilakukan mencakup dua jenis, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang mendalam mengenai pandangan serta pengalaman mereka selama proses pembelajaran.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan peneliti selama proses observasi dan wawancara, dokumentasi tersebut berupa video dan foto selama penelitian, serta

merekam suara saat wawancara berlangsung. Dokumentasi observasi bertujuan untuk menangkap kejadian-kejadian yang mungkin tidak teramati secara langsung dan memeriksa semua informasi tercatat dengan baik. Dokumentasi wawancara bertujuan untuk mencegah kehilangan data dan memastikan bahwa informasi yang relevan tercatat dengan akurat.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peneliti, catatan lapangan, pedoman wawancara, dan *smartphone*. Berikut adalah uraian dari instrumen penelitian yang digunakan.

1. Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan, serta melakukan pengumpulan dan analisis data secara langsung. Peneliti juga berperan dalam mengecek kesesuaian data yang diperoleh dari berbagai teknik dan sumber selama proses pengumpulan dan analisis data.

2. Lembar Catatan Lapangan

Lembar catatan lapangan digunakan untuk mencatat hal-hal penting selama observasi dan wawancara, terutama terkait peran guru dalam menanamkan kesadaran politik bagi pemilih pemula, khususnya di lingkungan SMK 2 Mei. Catatan ini membantu mendokumentasikan detail yang mungkin terlewatkan.

3. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara akan berisi daftar pertanyaan yang digunakan untuk memandu wawancara dengan guru dan siswa. Pedoman ini dirancang untuk mengumpulkan informasi yang mendalam terkait implementasi peran guru dalam menanamkan kesadaran politik bagi pemula, khususnya di lingkungan SMK 2 Mei. Dengan pedoman ini, peneliti dapat memastikan bahwa wawancara berlangsung secara terstruktur, tetapi tetap fleksibel agar bisa mengeksplorasi jawaban lebih lanjut.

4. *Smartphone*

Smartphone digunakan sebagai alat perekam suara dan untuk mendokumentasikan proses observasi serta wawancara. Dengan kemampuan merekam audio dan video, *smartphone* memberikan fleksibilitas dalam mengumpulkan data. Selain itu, *smartphone* memudahkan peneliti untuk mengambil gambar penting selama kegiatan pembelajaran, sehingga dapat memberikan konteks tambahan dalam analisis data.

4. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir.

1. Tahap Persiapan

a. Mengidentifikasi Masalah

Peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui pra-penelitian di SMK 2 Mei. Proses ini melibatkan wawancara langsung dengan Kepala Sekolah SMK 2 Mei. Hasil dari identifikasi masalah ini menjadi dasar untuk merancang penelitian yang lebih mendalam.

b. Menyiapkan Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan meliputi lembar catatan lapangan, pedoman wawancara, dan *smartphone* untuk merekam suara dan mendokumentasikan kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Memahami dan Memasuki Lapangan

Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan diri untuk melakukan pengumpulan data dengan memahami latar penelitian. Ini meliputi pengamatan terhadap situasi dan kondisilokasi penelitian.

b. Mengumpulkan Data

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan selama penelitian berlangsung.

3. Tahap Akhir

Peneliti akan mengumpulkan data kualitatif dan menganalisis data sesuai dengan metode yang telah dijelaskan, kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Pada tahap akhir, peneliti membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan kesesuaian informasi sebelum penarikan kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan evaluasi dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Miles dkk. (2014), aktivitas dalam proses analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus hingga tuntas sampai data jenuh yaitu ketika data sudah tidak memberikan informasi baru yang berarti. Analisis terdiri dari tiga aliran aktivitas yang terjadi secara bersamaan, yaitu data *condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Miles dkk., 2014).

1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan/atau mengubah data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris (Miles dkk., 2014). Saat pengumpulan data berlangsung, aktivitas yang dilakukan pada kondensasi data ialah menulis ringkasan, pengkodean, mengembangkan tema, menyusun pengkategorian, dan menulis catatan analisis. Proses kondensasi data dilakukan terus-menerus hingga laporan akhir selesai. Data yang dikondensasi akan memberikan gambaran data yang lebih tajam, teratur, terorganisir, terfokuskan, sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan akhir.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Aktivitas berikutnya dari analisis data adalah data display (penyajian data). Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan

menggunakan bagan, hubungan antar kategori, teks naratif, dan sejenisnya (Miles dkk., 2014). Untuk penelitaian kualitatif, penyajian data yang paling umum adalah *extended text* atau uraian teks yang diperpanjang. Penyajian data berfungsi sebagai cara untuk menampilkan dan menunjukkan data dan informasi yang terorganisir, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang lebih jelas.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Conclusion drawing atau penarikan kesimpulan adalah aktivitas terakhir dalam analisis data kualitatif. Peneliti menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna dari setiap data yang telah dikondensasi dan disajikan dengan mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada. Proses verifikasi melibatkan pemeriksaan kevalidan temuan melalui diskusi dengan rekan peneliti dan upaya untuk mereplikasi hasil dalam konteks data lain. Dengan demikian, langkah ini memastikan kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung pengembangan pengetahuan lebih lanjut. Proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan yang diperoleh dari berbagai teknik dan sumber data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran guru PPKn dalam menanamkan kesadaran politik siswa sebagai pemilih pemula di SMK 2 Mei Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran guru PPKn dalam mengaitkan materi dengan isu politik faktual telah berjalan dengan baik. Guru tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga menghubungkannya dengan kondisi politik aktual sehingga siswa mampu memahami konsep demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi politik secara lebih kontekstual. Hal ini membantu menumbuhkan kesadaran politik siswa sebagai pemilih pemula.
2. Penggunaan media interaktif dalam pembelajaran PPKn terbukti mendukung peningkatan pemahaman dan minat siswa terhadap isu-isu politik. Media seperti video pembelajaran, berita aktual, dan diskusi berbasis digital membuat siswa lebih tertarik, aktif, serta mampu berpikir kritis terhadap fenomena politik yang berkembang.
3. Keterlibatan aktif siswa dalam menyampaikan pendapat menunjukkan adanya perkembangan kesadaran politik. Melalui diskusi kelas, tanya jawab, dan penyampaian argumentasi, siswa belajar menghargai perbedaan pendapat, berpikir rasional, serta berani menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
4. Pelaksanaan simulasi pemilu di sekolah memberikan pengalaman nyata kepada siswa tentang proses demokrasi. Kegiatan ini membantu siswa memahami mekanisme pemilihan umum, pentingnya suara dalam menentukan kepemimpinan, serta menumbuhkan sikap partisipatif sebagai calon pemilih pemula.

5. Penerapan literasi politik digital oleh guru PPKn membentuk sikap kritis siswa dalam menyaring informasi politik di era digital. Siswa menjadi lebih selektif terhadap berita hoaks dan mampu menganalisis informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
6. Peran OSIS dan kegiatan demokrasi sekolah turut memperkuat pembentukan kesadaran politik siswa. Melalui organisasi sekolah dan kegiatan pemilihan pengurus, siswa belajar praktik demokrasi secara langsung, sehingga nilai-nilai partisipasi, tanggung jawab, dan kepemimpinan dapat berkembang secara nyata.

Secara keseluruhan, guru PPKn memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membentuk kesadaran politik siswa sebagai pemilih pemula. Melalui strategi pembelajaran yang kontekstual, interaktif, partisipatif, serta didukung kegiatan demokrasi sekolah, kesadaran politik siswa di SMK 2 Mei Bandar Lampung dapat berkembang dengan baik.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Guru PPKn diharapkan terus berkembang dengan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan media digital dan memperluas jejaring kerja sama dengan lembaga demokrasi seperti KPU dan Bawaslu.
2. Sekolah diharapkan memfasilitasi kegiatan praktik demokrasi seperti Pekan Demokrasi Sekolah dan Proyek literasi politik berbasis isu publik.
3. Peneliti disarankan melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan campuran untuk evaluasi pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi demokrasi siswa di berbagai jenjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Mohammad Mona, dan Edi Siswanto. 2023. *Implementasi pendidikan berbasis multikultural sebagai upaya penguatan nilai karakter toleransi dan cinta damai*. Jurnal Kultur Demokrasi 12(1).
- Adha, Mohammad Mona, Rahmawati, D., Febra Anjar Kusuma, dan Rohman, R. 2023. *Penerapan metode hybrid learning dalam peningkatan pemahaman peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3(2):45–52.
- Aprilia, C. R., & Azmi, A. 2021. Sosialisasi Pemilu Tahun 2019 Terhadap Pemilih Pemula Oleh KPU Kabupaten Solok Selatan. *Journal of civic Education*, 4(1), 32-38.
- Ardiansyah, R., Putri, A. R., & Lestari, D. 2023. Teknik wawancara dalam penelitian kualitatif pendidikan. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(1), 45–56.
- Arsyad, A. 2020. Media pembelajaran. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Aslett, K., Aspara, J., & Metzger, M. 2024. Online searches to evaluate misinformation can increase belief in misinformation. *Nature* , 616(7955), 1–12.
- Budimansyah, D. 2020. *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif kebijakan dan praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Budimansyah, D., & Karim, A. 2021. Pembelajaran kewarganegaraan berbasis partisipasi untuk meningkatkan kesadaran politik siswa. *Jurnal Civics*, 18(2), 145–158.
- Creswell, J. W., Poth, C. N., Clark, V. L. P., & Garrett, A. L. 2018. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Darmadi, H. 2020. Pendidikan politik untuk generasi muda . Alfabeta.
- Dewi, U., Anggraini, M., & Widodo, S. 2022. Learning to evaluate: An intervention in civic online reasoning. *Jurnal Education Technology* , 6(2), 112–125.
- Farida, S., Mohammad Mona Adha, dan Anwar, A. 2024. *Pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran PPKn*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 5(1):85–96.

- Fauzan, A. 2024. Simulasi pemilu sebagai metode pembelajaran demokrasi di sekolah menengah. *Jurnal Demokrasi* , 5(1), 33–49.
- Gozálvez, V., & Calandín, J. G. 2025. Civic education in a new post-democratic context. *Prospects* , 54(1), 1–15.
- Halaluddin, & Hengki, H. 2019. Pendekatan kualitatif dalam penelitian pendidikan. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 7(2), 90–99.
- Hambali, H., Hariyanti, H., & Eddison, A. 2021. The model of voter education of women-based democracy volunteers. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 48-60.
- Harahap, N. 2020. Penelitian kualitatif: Karakteristik dan penerapannya dalam ilmu sosial. *Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 1–10.
- Hariyanti, & Hambali. 2021. Identifikasi Kendala Relawan Demokrasi Basis Perempuan sebagai Fasilitator Pendidikan Pemilih di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. *Journal of Moral and Civic Education*, 5(1).
- Helaluddin, Wijaya, H. 2019. Analisis Data Kualitatif. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hidayat, R. 2021. Peran guru PPKn dalam menumbuhkan partisipasi politik siswa sekolah menengah. *Jurnal Moral Kemasyarakatan* , 6(2), 87–98.
- Iskandar, D., & Marlina, N. 2019. Pendidikan Pemilih Muda Cerdas Di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 01(01). 12-18.
- Karawang, UBP, C. 2024. Pengaplikasian media pembelajaran kotak suara dalam pembelajaran demokrasi. *Jurnal CIVICS* , 9(1), 45–55.
- Kemdikbudristek. 2022. Pendidikan Pancasila: Buku siswa kelas X . Pusat Perbukuan.
- Kemdikbudristek. 2023a. Pendidikan Pancasila: Buku siswa kelas XI . Pusat Perbukuan.
- Kemdikbudristek. 2023b. Pendidikan Pancasila: Buku siswa kelas XII . Pusat Perbukuan.
- Kurnia, N., & Astuti, S. I. 2020. Literasi digital dan tantangan pendidikan kewarganegaraan di era informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(2), 123–135.
- Kurniadi, Y U., et al. 2020. Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial). Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408-420.
- Kurniawati, D. 2023. Pembelajaran kritis dalam PPKn untuk membentuk kesadaran politik siswa. *Civics: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* , 7(2), 101–114.

- Le, K., & Nguyen, M. 2021. Education and political engagement. *International Journal of Educational Development*, 85(April), 102441.
- Liani, Chairunisa, Yunisca Nurmalisa, dan Nurhayati, N. 2023. *Pengaruh video pembelajaran berbasis animasi terhadap tingkat pemahaman materi pada mata pelajaran PPKn peserta didik kelas VIII*. *Jurnal Kultur Demokrasi* 12(1).
- M. H. Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing
- Mahendra, W. 2023. Implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PPKn. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* , 14(1), 55–66.
- Martini, E., Azwar, I., & Pringga, F. S. 2018. Pengaruh pendidikan politik terhadap kesadaran partisipasi pemilih pemula di smk pgri 1 cimahi jawa barat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Mauliza, Z. 2022. Pemanfaatan media visual dalam pembelajaran PPKn di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* , 5(1), 22–32.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nanggala, A. 2020. Citizenship Education as a Democracy Learning for Students in Higher Education. *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 3(1), 69.
- Nurdiansyah, E., Pratama, L., & Sari, N. 2025. Needs analysis for collaborative and experiential civic education in Indonesian schools. *Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Studi Sosial* , 4(1), 1–12.
- Nurjanah, S., Rahmawati, N., & Putra, R. 2023. Upaya guru PPKn dalam mengembangkan civic responsibility peserta didik. *Sosia: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* , 12(1), 25–40. Orion Press.
- Piaget, J. 1970. *Science of education and the psychology of the child*. New York:
- Pradana, Y., Hapsari, F., & Wijaya, R. 2025. Penguatan civic engagement dan political voice peserta didik sekolah menengah. *Integralistik* , 36(1), 10–20.
- Rafni, A., & Suryanef. 2019. Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula Melalui Rumah Pintar Pemilu. *Jurnal Of Moral and Civic Education*, 3(1), 1-8.
- Raharjo, T. W. 2021. Literasi politik digital generasi muda dalam menghadapi disinformasi. *Jurnal Civic Education*, 5(2), 101–112.
- Rahmawati, L., & Nugroho, A. 2022. Pemanfaatan media digital dalam pembelajaran PPKn untuk meningkatkan literasi politik siswa. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(1), 33–45.

- Rahmayanti, E. 2023. Peran Guru Dalam Menerapkan Pembelajaran Ppkn Sebagai Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15(Special-1), 414-422.
- Ramadhon, M. I. 2025. Analysis of political participation among FKIP students. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Kewarganegaraan* , 9(1), 77–90.
- Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rubyanti, R. 2009. Pengaruh Popularitas terhadap Pilihan Pemilih Pemula (Fenomena Artis dalam Pilkada). Tesis magister, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ruiz-Eugenio, L., Serrano, P., & Marta, J. 2023. Dialogic popular education and its social impact. *RELA: Learning and Action* , 8(1), 12–28.
- Sanjaya, W. 2020. *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sari, Felia Mutiara, Hermi Yanzi, dan Rohman, R. 2023. *Peran guru PPKN dalam pembentukan sikap tanggung jawab peserta didik di SMK N 1 Gadingrejo*. *Jurnal Kultur Demokrasi* 12(1).
- Sartori, G. 2016. *The theory of democracy revisited*. In *Democracy: A Reader* (pp. 192-196). Columbia University Press.
- Setiajid. 2011. Orientasi Politik yang Mempengaruhi Orientasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2010. *Jurnal Integralistik*, 1, 18-33.
- Sholikin, A. 2021. Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(02), 168-184.
- Siregar, A. 2022. Internalisasi nilai demokrasi melalui pembelajaran PPKn di sekolah menengah atas. *Jurnal PPKSD* , 7(1), 40–50.
- Soeprapto, Adi. 2014. Komunikasi dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2014 di DIY. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12, 39-54.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, A. 2019. Pendidikan politik bagi pemilih pemula di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 15–25.

- Widodo, S. 2022. Pembelajaran berbasis isu aktual untuk meningkatkan kesadaran politik siswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(1), 55–67.
- Winataputra, U. 2020. Pendidikan kewarganegaraan: Perspektif teoretik dan praktik . Rajawali Pers.
- Winataputra, U. S. 2021. *Pendidikan kewarganegaraan: Refleksi historis dan konseptual*. Jakarta: Universitas Terbuka.